

LAPORAN PENELITIAN



PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

((Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Kecamatan Kota Balikpapan))

TIM PENELITI :

1. Nama Ketua : H. Ahmad Jubaidi, S.Sos, M.Si
NIDN : 1129036601
2. Nama Anggota 1 : Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIDN : 0021094801
3. Nama Anggota 2 : Salasiah, S.Sos., M.Si
NIDN : 1117016901
4. Nama Anggota 3 : Hj.Maya Preva Biantary, S.Hut, MP
NIDN : 115057201
5. Nama Anggota 4 : Ir. H. Abdul Rahmi, MP
NIDN : 0019116201
6. Nama Anggota 5 : Drs. Sudirman
NIK : -

**KERJASAMA DINAS SOSIAL PROVINSI KALTIM DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
SAMARINDA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan	:	Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial Di Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Kota Balikpapan)
Kode>Nama Rumpun Ilmu	:	3-WD
Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	H. Ahmad Jubaidi, S.Sos, M.Si
b. NIDN	:	1129036601
c. Jabatan Fungsional	:	Lektor
d. Fakultas/Program Studi	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
e. Nomor HP	:	081256297266
f. Surel (e-mail)	:	jubaidiahmad@yahoo.co.id
Anggota Peneliti 1		
a. Nama Lengkap	:	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
b. NIDN	:	0021094801
c. Fakultas/Program Studi	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /LPPM
Anggota Peneliti 2		
a. Nama Lengkap	:	Salasiah, S.Sos., M.Si
b. NIDN	:	1117016901
c. Fakultas/Program Studi	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Anggota Peneliti 3		
a. Nama Lengkap	:	Hj.Maya Preva Biantary, S.Hut, MP
b. NIDN	:	115057201
c. Fakultas/Program Studi	:	Pertanian/Kehutanan/LPPM
Anggota Peneliti 4		
a. Nama Lengkap	:	Ir. H. Abdul Rahmi, MP
b. NIDN	:	0019116201
c. Fakultas/Program Studi	:	Pertanian/Agroteknologi/Puslitbang
Anggota Peneliti 5		
d. Nama Lengkap	:	Drs, Sudirman
e. NIK	:	-
f. Fakultas/Program Studi	:	Staf di Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sumber Biaya	:	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Waktu Pelaksanaan	:	Agustus – September 2014

Samarinda, Oktober 2015

Mengetahui
Dekan,

Dosen Peneliti,

(Drs. Damai Darmadi, M.Si)
NIP. 195705041986011001

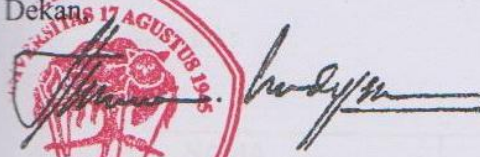
H. Ahmad Jubaidi, S.Sos, M.Si
NIDN. 1129036601

Menyetuju,
Ketua LPPM

Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001

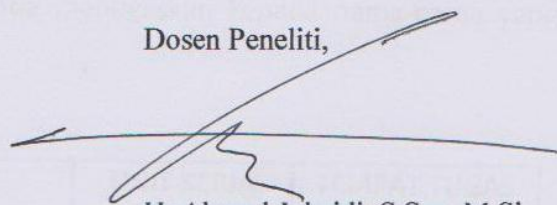
Samarinda, Oktober 2015

Mengetahui
Dekan



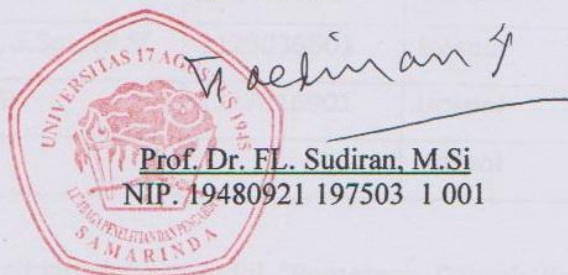
(Drs. Damai Darmadi, M.Si)
NIP. 195705041986011001

Dosen Peneliti,



H. Ahmad Jubaidi, S.Sos, M.Si
NIDN. 1129036601

HFL Menyetujui,
Ketua LPPM



Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743391
 Email : lp2m@untag-smd.ac.id

SURAT TUGAS

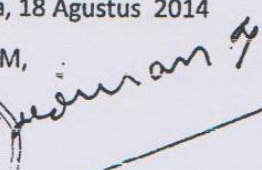
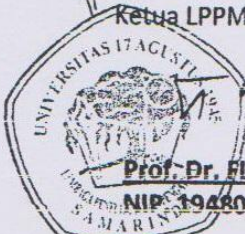
Nomor : 031 / UN.17/LPPM/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dibawah ini :

NO.	NAMA	NIDN	UNIT KERJA	TEMPAT TUGAS
1.	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	0021094801	LPPM	Kutai Timur
2.	Maya Preva Biantary, S.Hut, MP	1115057201	LPPM	Kukar
3.	Nurwahyudi, S.Sos	-	LPPM	Kutai Timur
3.	Ir. H. Abdul Rahmi, MP	0019116201	Pertanian	Kukar
4.	H. Achmad Jubaidi, S.Sos, M.Si	1129036601	Isospol	Bontang
5.	Salasiah, S.Sos, M.Si	1117016901	Isospol	Samarinda
6.	Drs. Sudirman	-	Isospol	Samarinda

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2014" dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi selama bulan Agustus – September 2014. dan akan memberikan semua laporan penelitian, (hardcopy dan softcopy) ke LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 18 Agustus 2014
 Ketua LPPM,


Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
 NIP. 19480921 197503 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

KATA PENGANTAR

Ringkasan draft Laporan Akhir, menggambarkan secara ringkas kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial yang telah dilakukan oleh tim peneliti di lokasi terpilih pada 5 (lima) daerah, yaitu : Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Kota Balikpapan Barat.

Penyusunan draft Laporan Akhir ini berdasarkan hasil kunjungan lapangan, laporan antara dan FGD tahap 2 (dua) yang telah dilakukan pada bulan Agustus 2014.

Penyusunan draft Laporan Akhir ini, masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kami mohon saran, masukan dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan ini, khususnya berkaitan dengan temuan hasil penelitian yang diberikan oleh beberapa informan, pengamatan dilokasi studi dan data pendukung lainnya.

Akhir kata dengan tersusunnya draft Laporan Akhir ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian laporan ini, semoga bermanfaat. Amin.

Samarinda, September 2014

Tim Pemetaan

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		viii
DAFTAR GAMBAR		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Sasaran	2
	D. Hasil Yang Diharapkan	2
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	3
	A. Teori Konflik	3
	B. Pemetaan Konflik	4
	C. Identifikasi Akar Masalah Konflik	4
	D. Definisi Operasional	7
BAB III	PENDEKATAN DAN METODOLOGI	10
	A. Pendekatan Pekerjaan Pemetaan	10
	1. Sosialisasi dan Pendampingan	10
	2. Kelembagaan/ Instutusi Masyarakat	10
	3. Survey Lapangan dan Instansional	10
	B. Ruang Lingkup Pekerjaan	11
	1.Persiapan dan Penjajakan Kerjasama Pemetaan	11
	2.Pemetaan : FGD (Focus Group Discussion)	11
	3.Pengumpulan Data lapangan	11
	4.Penyusunan dan Review Hasil Pemetaan	12
	C. Keluaran / Produk Pekerjaan	12
BAB IV	PENYAJIAN DATA – RINGKASAN HASIL PENELITIAN	14
	A. Ringkasan Hasil Penelitian	14
	1. Kota Bontang	14
	2. Kabupaten Kutai Kartanegara	20
	3. Kecamatan Balikpapan Barat	27
	4. Kecamatan Sungai Kunjang	34
	5. Kabupaten Kutai Timur	39
	B. Peta Daerah Rawan Bencana/ Konflik Sosial	52

BAB V	SOLUSI DAN REKOMENDASI		79
	A	Alternatif Rekomendasi Pencegahan Bencana/ Konflik Sosial	79
	1.	Sinergitas Peran Pemerintah, TNI – POLRI, Swasta dan Unsur Masyarakat	79
	2.	Advokasi Perdamaian Aspek Hukum	79
	3.	Optimalisasi Komunikasi Sosial, Kearifan Lokal	80
	4.	Pemetaan Identifikasi Ancaman Potensi Konflik Sosial	80
	B.	Rekomendasi Penghentian Bencana/ Konflik Sosial	81
DAFTAR PUSTAKA			82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Identifikasi Faktor Penyebab Daerah Rawan Bencana Sosial	13
Tabel 2.	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	16
Tabel 3.	Ringkasan Hasil Penelitian	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Model Kerangka Berpikir Pemetaan Bencana Sosial	6
Gambar 2.	Bagan Alur Kerangka Pendekatan Teknik Pekerjaan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Kaltim	12
Gambar 3.	Peta Daerah Rawan Bencana Sosial Kota Bontang	74
Gambar 4.	Peta Daerah Rawan Bencana Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	75
Gambar 5.	Peta Daerah Rawan Bencana Sosia Kecamatan Balikpapan Barat	76
Gambar 6.	Peta Daerah Rawan Bencana Sosia Kecamatan Sungai Kunjang	77
Gambar 7.	Peta Daerah Rawan Bencana Sosia Kab Kutai Timur	78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan merebaknya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan), sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Saat ini konflik dari aspek SARA dan Dampak Industri; perkebunan dan ketenagakerjaan merupakan konflik yang sering terjadi dan sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2014. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik. (Jurnal Srigunting, Maret 15: 2013).

Begitu juga dengan potensi bencana sosial di daerah Kaltim cukup tinggi (*Tribun Kaltim: 8 Agustus 2012*), potensi bencana social tersebut antara lain kerusuhan antar warga dan potensi konflik lainnya. Isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi hal yang harus ditangani dan dikelola secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat tidak mudah terhasut dengan berbagai isu yang menyesatkan dan tidak jelas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (provokator). Pengalaman pahit konflik bencana sosial di Kota Tarakan, Nunukan, Kutai Barat tahun 2012 dan lainnya, jangan sampai terulang kembali. Termasuk potensi bencana alam yang ada di Kaltim.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa permasalahan bencana sosial, khususnya konflik sosial begitu kompleks dan dinamis, dan terus mengalami perubahan, termasuk di potensi bencana social di wilayah Kalimantan Timur, *salah satu alternative untuk mencari solusi alternative penanganan Bencana Sosial adalah perlunya Pemetaan Potensi Bencana Sosial, khususnya di Kalimantan Timur.*

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pemetaan potensi bencana sosial antara lain :

1. Menggambarkan identifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial maupun bencana alam, saat ini maupun yang akan datang.
2. Membuat pemetaan daerah rawan bencana sosial, baik konflik sosial maupun bencana alam.
3. Untuk dapat dijadikan pedoman bagi unsur pelaksana di lapangan dalam penanggulangan konflik sosial, khususnya di Kalimantan Timur.
4. Memberikan saran, masukkan pencegahan dan penyelesaian konflik kepada pihak terkait lainnya tingkat pusat dan daerah.

C. Sasaran :

Sasaran pemetaan daerah rawan bencana, antara lain :

1. Tokoh Masyarakat, meliputi :
 - a. Tokoh Agama
 - b. Tokoh Adat/Budaya
 - c. Tokoh Pemuda
 - d. Tokoh Wanita
2. Organisasi/Relawan Pelopor perdamaian, Lembaga Swadaya Masyarakat/Forum kerukunan/ persatuan/ komunikasi antar umat/adat/etnis/kelompok/golongan.
3. Stake holder dalam penanganan konflik sosial: Kepolisian, kesbangpol, Dinas sosial, Kejaksaan, Badan Pertanahan (BPN), BPBD dll

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pekerjaan pemetaan daerah rawan bencana sosial, antara lain:

1. Teridentifikasinya faktor-faktor penyebab bencana sosial (konflik sosial dan bencana alam) di lokasi kegiatan.
2. Produk pemetaan (peta) daerah rawan bencana sosial maupun potensi bencana alam.
3. Teridentifikasi berbagai alternatif solusi, khususnya penanganan konflik sosial.
4. Terciptanya komunikasi dan sinergitas yang baik pencegahan dan penyelesaian konflik kepada pihak terkait lainnya tingkat pusat dan daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik

Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik memiliki nilai positif, sejarah jaman maupun kenyataan hingga kini membuktikan bahwa konflik sosial secara langsung selalu menimbulkan akibat negatif. Bentrokan, kekejaman maupun kerusuhan yang terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan penganut agama yang satu dengan golongan penganut agama yang lain. Kesemuanya itu secara langsung mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan juga spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam kesumat. Misalnya Konflik Etnis (Kerusuhan Sosial) di Kalimantan Barat.

Fakta menunjukkan bahwa konflik berbasis kekerasan di Indonesia bisa menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari segi isu maupun para pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu yang lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Sementara itu, upaya penanganan konflik (prevention, resolution, and post conflict action) yang dilakukan selama ini pada beberapa daerah konflik seperti: di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara, dan terakhir konflik yang berbasis SARA seperti terjadi terhadap warga SARA di Cikeusik Banten serta konflik berbasis Sumber Daya Alam seperti terjadi di Mesuji yang mengakibatkan korban jiwa masih belum menunjukkan hasil penyelesaian yang optimal, karena Penanganan konflik belum sampai menyentuh pada akar permasalahan konflik.

Secara teoritis terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu kekerasan tersebut. Akan tetapi seringkali kekerasan merupakan muara dari terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Menurut Galtung dalam Sutanto (2005), konflik merupakan penyebab niscaya bagi kekerasan, karena di bawah atau di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Jika konflik dianggap sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan, sesungguhnya potensi kekerasan ada di setiap individu. Hal ini karena, konflik sedang dan akan dialami oleh hampir setiap orang. Seperti Kai Fitthjof & Brand Jacobsen (dalam Sutanto, 2005) menyatakan bahwa, konflik berada dalam semua tataran, di dalam diri individu, diantara individu-individu, di dalam dan diantara masyarakat, negeri, dan budaya. Konflik adalah suatu yang alamiah. Ia dialami orang-orang dengan latar belakang, budaya, kelas, kebangsaan, usia, jender apapun, di tengah kehidupan sehari-hari. Kenyataan menggarisbawahi bahwa konflik sejatinya omnipresent, ada di mana saja. Ia melekat pada tiap aktivitas hidup bermasyarakat dan mustahil dapat dihilangkan.

B. Pemetaan Kondisi Konflik

1. Adanya kesenjangan sosial antar kelompok.
2. Sikap arogansi dan egosentris kelompok.
3. Lemahnya interaksi sosial.
4. Ketidakseimbangan perhatian pemerintah daerah.
5. Kurangnya pengaruh tokoh masyarakat
6. Lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.
7. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan HGU lahan perusahaan.
8. Kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.
9. Rekrutmen karyawan dan pengelolaan Satpam yang tidak memprioritaskan masyarakat sekitar perusahaan.

C. Identifikasi Akar Masalah Konflik

1. Sara (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)

- a) Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
- b) Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
- c) Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
- d) Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

2. Industri, Perkebunan, Ketenagakerjaan dan Economy Gap

a) Status kepemilikan lahan

- Pengadaan lahan secara paksa
- Konflik batas – batas lahan
- Tumpang tindih kepemilikan lahan

b) Perizinan

- Tumpang tindih perizinan lahan
- Penyalahgunaan pemanfaatan lahan
- Tumpang tindih kewenangan perizinan pemerintah

c) Masyarakat

- Kemiskinan dan kebodohan
- Mengakibatkan (kecemburuan) tenaga kerja lokal
- Karakter dan budaya masyarakat lokal
- Komunikasi dan sosialisasi antara pengusaha dan masyarakat lokal
- Umur
- PHK sepihak
- Tenaga lokal (diskriminasi)
- Out sourcing
- Keselamatan kerja
- Serikat pekerja

e) Pemerintah

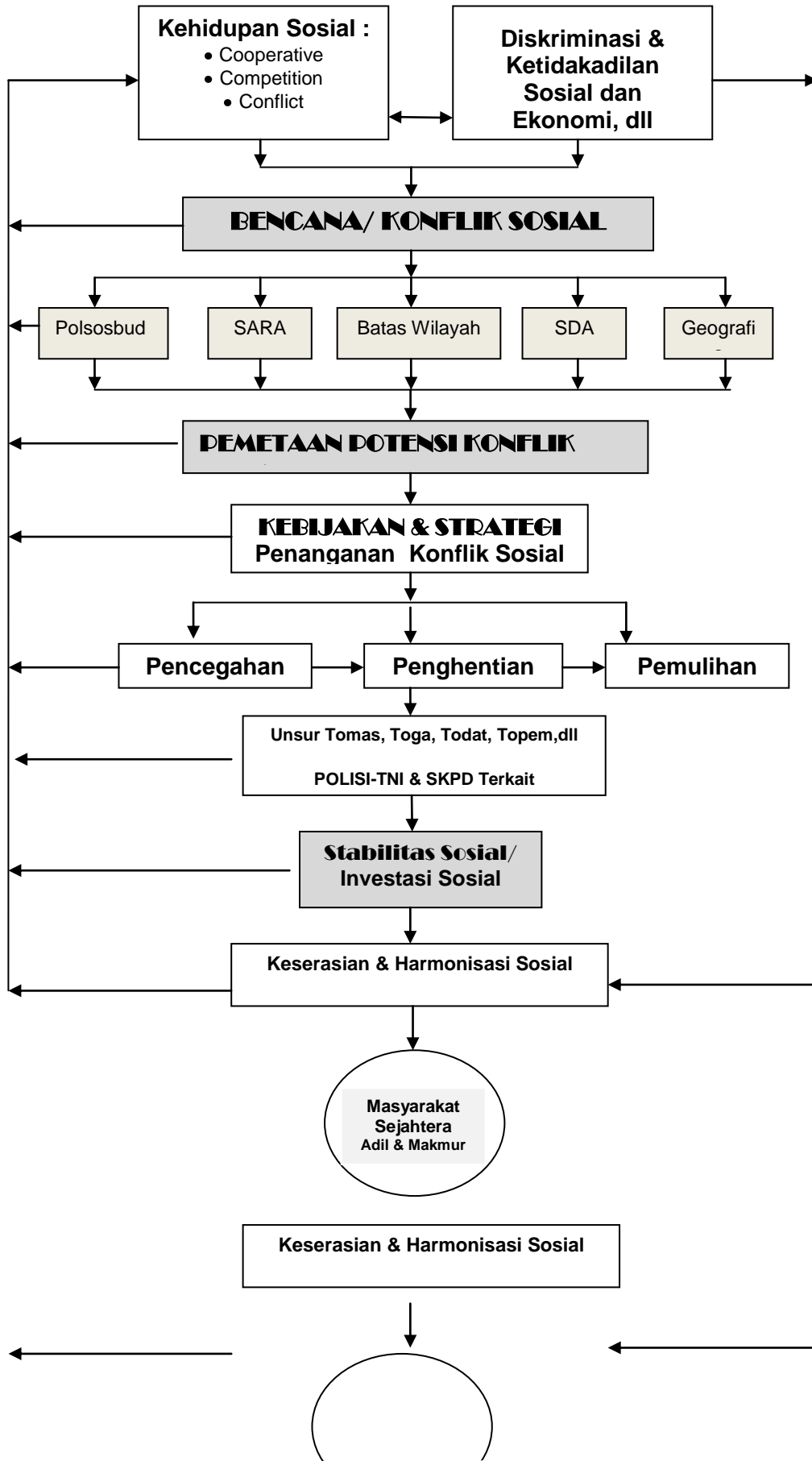
- Kurang berfungsinya aparatur pemerintah
- Kurang perhatian aparatur pemerintah.

3. Kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat lokal

4. Lembaga Swadaya Masyarakat / NGO (National Government Organization)

- Kepentingan praktis LSM/ Ormas
- Kepentingan komoditas LSM/Ormas
(Sumber : Rapim Polri, Jakarta 30 Januari 2013)

Gambar 1 : Model Kerangka Berpikir Pemetaan Identifikasi Daerah Rawan Bencana Sosial



D. Definisi Operasional

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dan dukungan beberapa teori konflik, berikut ini dijelaskan definisi operasional: variabel dan indikator penyebab daerah rawan bencana sosial di Kalimantan Timur, lokasi studi Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser/ Grogot dan Kutai Barat), sebagai berikut :

1. Faktor Palsosbud (Politik, Sosial dan Budaya)

Variabel	Indikator	Ket
Palsosbud (Politik, Sosial dan Budaya)	<p>Aspek Politik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerawanan potensi konflik PILKADA : Pilgub, Pilbub/Pilwali di daerah • Adanya indikasi perebutan kekuasaan antar elit politik, yang melibatkan massa banyak. • Adanya indikasi ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang. • Adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar daerah, kecamatan, kelurahan. • Adanya Kesenjangan pendidikan masyarakat lokal dan pendatang • Adanya indikasi Kebijakan daerah tdk berpihak pada rakyat, misalnya bidang perkebunan, pertambangan dal lainnya <p>Aspek Sosial & Kebudayaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya cara pandang yang berbeda seseorang/ kelompok/komunitas/ terhadap adat istiadat, budaya orang lain. • Adanya Internalisasi kesenian dan kebudayaan lain secara paksa atau kedalam masyarakat tertentu. • Adanya pemaksaan perubahan budaya warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja. • Adanya pemaksaan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terjadi perubahan drastis sistem pada mata pencaharian pada tatanan ekonomi dan lainnya. • Adanya monopoli dan eksploitasi orang tertentu terhadap sumber hajat hidup masyarakat banyak. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Omas, OKP atau organisasi lain mempunyai paham radikalisme dan kekerasan. • Adanya masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya. • Adanya ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu. • Adanya provokasi dan provokator lokal, daerah, pusat hingga internasional. • Adanya tumpang tindih lahan antar warga, maupun dengan pihak perusahaan. • Peredaran minuman keras (Miras) di kalangan generasi muda. 	
--	--	--

2. Faktor Sara (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan)

<p>Sara (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan)</p>	<p>Aspek Keetnisan/ Suku :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya. • Adanya pelecehan satu etnis ke etnis lainnya. • Adanya hak dan kewajiban lintas etnis yang tidak dipenuhi. Misalnya denda adat belum dipenuhi. • Adanya intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hak ulayat etnis tertentu. • Diskriminasi dalam akses peluang kerja bagi etnis tertentu, instansi pemerintah atau swasta. • Ketidakadilan dalam distribusi pemerataan pembangunan wilayah etnis tertentu. <p>Aspek Agama :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya isu pelecehan agama baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan. • Adanya penghinaan keyakinan agama dan suku tertentu. • Adanya eksklusifme internal agama maupun suku. • Adanya aliran sesat/ aliran menyimpang dari agama tertentu. • Ada nya pemaksaan ajaran agama tertentu terhadap agama lainnya. • Adanya cara pandang yang berbeda 	
---	--	--

	seseorang/ kelompok/komunitas/ negara tertentu terhadap nilai agama.	
--	--	--

3. Faktor Batas Wilayah

Batas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya batas wilayah yang melanggar daerah lain (mencaplok) daerah lain. • Adanya perbedaan pendapat/ persepsi tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah berkaitan batas wilayah. • Adanya indikasi potensi konflik antar warga berkaitan dengan batas wilayah. 	
---------------	--	--

4. Faktor Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Konflik antara pemerintah dengan rakyat, antara lain bersumber dari eksploitasi sumber daya alam, atau intervensi kebijakan/ regulasi . • Adanya Kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi tambang dengan lahan warga • Adanya ketidakseimbangan penguasaan lapangan pekerjaan pada perusahaan di daerah, seperti perkebunan dan pertambangan • Adanya Kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga lokal dengan pendatang di lokasi pertambangan atau perkebunan. • . Adanya angkutan perusahaan yang menggunakan lahan warga setempat. 	
------------------	--	--

5. Faktor Geografis (Potensi Rawan Bencana Alam)

Geografis (potensi rawan bencana alam)	<ul style="list-style-type: none"> • Meletus gunung berapi • Tsunami • Banjir • Tanah Longsor • Kebakaran • Angin Topan, Putting Beliung • kekeringan • Bencana alam lainnya 	
--	--	--

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Beberapa pendekatan, selanjutnya dapat dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kegiatan pemetaan potensi bencana sosial di Kaltim. Beberapa metode pendekatan yang dipakai, antara lain melalui:

A. Pendekatan Pekerjaan

1. Sosialisasi dan Pendampingan

- a. Melakukan rapat-rapat (mulai dan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring) baik dengan dinas/instansi terkait di propinsi/kabupaten/kota maupun dengan stakeholders lainnya, seperti Kesbangpol Prov/ Kab/Kota, Polda Kaltim/Polres, dinas sosial dan instansi terkait lainnya.
- b. Melakukan sosialisasi awal kepada pihak-pihak terkait dan kepada unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lainnya.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target survey ke lokasi rawan potensi konflik.
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap input, proses dan output dari awal pekerjaan sampai akhir.

2. Kelembagaan/ Institusi masyarakat

- a. Melakukan pendekatan terhadap lembaga masyarakat seperti paguyuban-paguyuban, lembaga adat, lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya.
- b. Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh pada kelembagaan tersebut.
- c. Melakukan pendekatan terhadap lembaga-lembaga indikasi sebagai pemicu konflik di daerah dan pengurus organisasi tersebut.

3. Survei Lapangan dan Instansional

- a. Melakukan survai ke instansi terkait berhubungan dengan data sosial, ekonomi, kependudukan, khususnya kepada BPS di daerah lokasi studi.
- b. Melakukan survai lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan data-data daerah rawan potensi konflik.
- c. Melakukan perhitungan jumlah lembaga/ institusi sosial, paguyuban, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya dan tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah bersangkutan.
- d. Penyebaran kuesioner

Untuk menghasilkan data yang diinginkan melalui survey lapangan, dapat pula dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke masing-masing pejabat terkait dan unsur tokoh masyarakat, adat, agama, yang memahami substansi permasalahan.

B. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Persiapan dan penjajakan Kerjasama Pemetaan

Laporan Pendahuluan :

- Persiapan pelaksanaan pekerjaan
- Pembentukan Tim Pemetaan
- Tinjauan literatur dan studi dokumentasi
- Metodologi yang digunakan penyusunan pemetaan
- Jadwal kegiatan dan penugasan personil
- Survey Instansional ke instansi terkait untuk mendapat data pendukung.
- Merumuskan instrument untuk persiapan survey ke lokasi kegiatan. Daftar pertanyaan (angket) dan pedoman wawancara (interview)

2. Pemetaan : Focus Group Discussion

- FDG (focus discussion group) tahap I. diskusi tenaga ahli terkait dengan para ahli dibidangnya berkaitan dengan metodologi pelaksanaan pekerjaan dan rancangan instrument untuk mendapatkan data dilokasi pemetaan.

3. Pengumpulan Data Lapangan (Field Research)

Kompilasi Data

Setelah survey lapangan dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pekerjaan studio, collecting data dan analisa data, menghasilkan

- Produk laporan adalah: InterimReport (laporan antara), antara lain berisi:
 - ✓ Data primer dan data sekunder serta data pendukung lainnya.
 - ✓ Rancangan teknik analisa data pemetaan.
 - ✓ Kegiatan FDG tahap II, diskusi tenaga ahli dengan para pakar lintas SKPD berkaitan dengan data yang telah diperoleh dan teknik analisa data yang dipergunakan untuk kegiatan pemetaan daerah rawan potensi konflik di Kaltim.

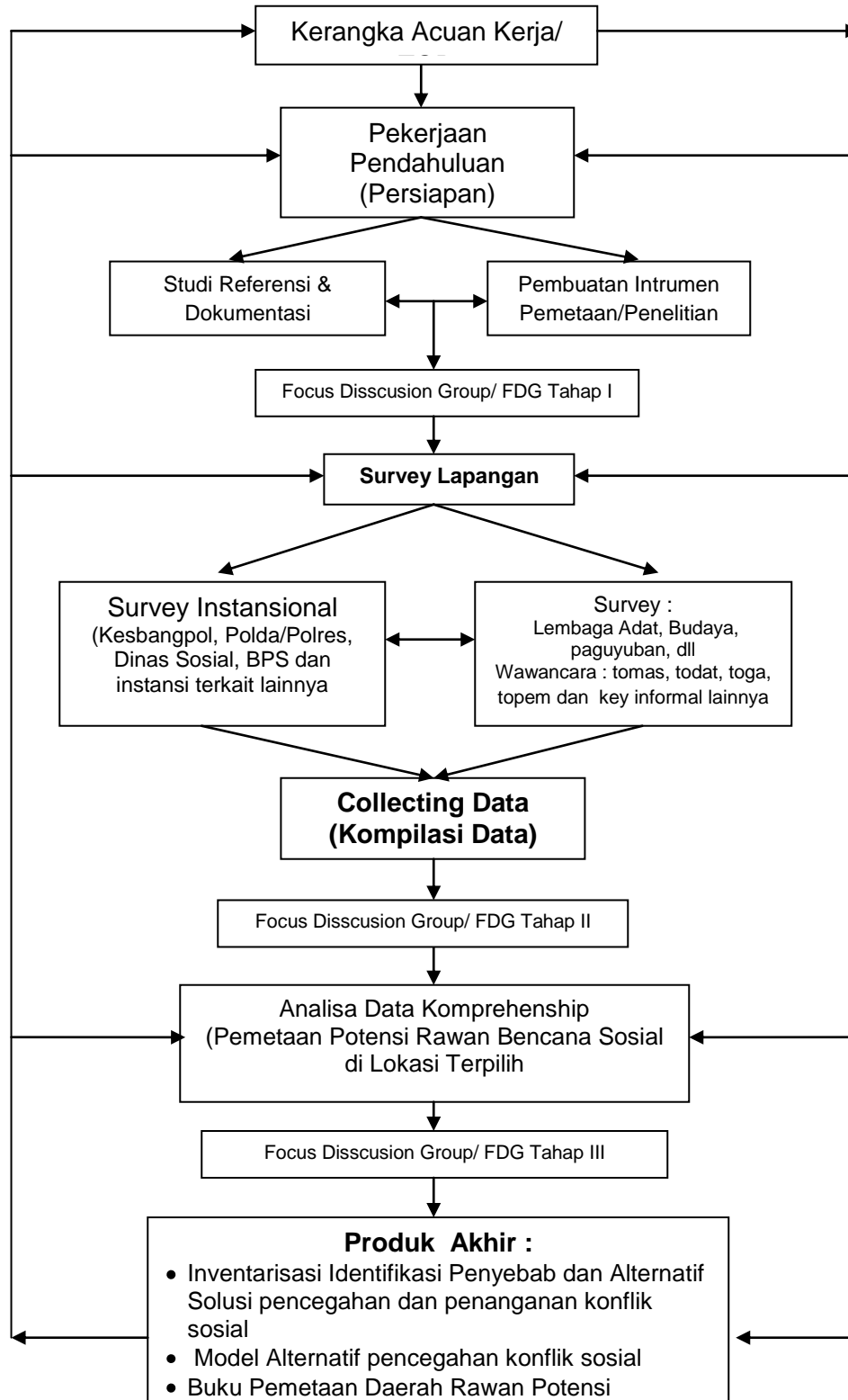
4. Penyusunan dan Review Hasil Pemetaan

Final Report (Laporan Akhir)

Setelah laporan antara selesai, maka langkah selanjutnya adalah :

- Pertemuan Penyusunan Hasil Pemetaan
- Gambaran hasil analisa dan rekomendasi pemetaan daerah rawan potensi bencana sosial di Kaltim.
- Penggandaan Hasil Pemetaan (Final Report ; Compact Disc dan Buku Hasil Pemetaan.

Gambar 2.
 Bagan Alur Kerangka Pendekatan dan Metodologi
 Pemetaan Potensi Rawan Bencana Sosial di Kalimantan Timur



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dilokasi kegiatan, wawancara dan jawaban informan terhadap daftar pertanyaan atau angket, berikut ini dikemukakan diuraikan penyajian data dan pembahasan pemetaan daerah rawan bencana sosial di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut :

A. Penyajian Data

1. Penyajian Data Kota Bontang

Berdasarkan hasil penelitian dari responden / informan diperoleh deskripsi tentang indentifikasi faktor penyebab daerah rawan bencana sosial di Kota Bontang, antara lain :

a. Aspek Politik

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik akibat pilkada Kota Bontang tahun 2015 yang akan datang, misalnya calon walikota atau massa pendukung calon maupun partai yang tidak siap menerima kekalahan atau mungkin dicurangi dalam proses perhitungan suara. *(Sumber: dialog kerawanani konflik dgn unsur paguyuban Kota Bontang, tanggal 18 Agustus 2014)*
- Terdapat adanya potensi konflik akibat Pilkada, Pilwali di Kota Bontang yang akan datang biasanya calon walikota yang tidak siap kalah, dengan melibatkan massa pendukung *(Sumber : wawancara dengan Shb Dinas Sosial Kota Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).*
- Kemungkinan terdapat adanya potensi konflik Pilkada, Pilwali di Kota Bontang, biasanya calon yang tidak siap menerima kekalahan, dengan melibatkan massa pendukung untuk memaksakan kehendaknya atau kepentingan calon tertentu.
- Adanya indikasi perebutan kekuasaan antar elit politik yang melibatkan massa banyak di Bontang yang dilakukan oleh partai politik maupun antar ormas atau OKP untuk kepentingan tertentu.
- Terdapat adanya kesenjangan dan ketidakadilan layanan fasilitas umum, khususnya di Bontang Selatan dibandingkan dengan daerah lainnya, misalnya air PDAM tersendat-sendat distribusinya dan lampu listrik dari PLN sering padam (byarpet).
- Terlambat Pemkot Kota Bontang membuat peraturan atau implementasi sanksi Undang-Undang kepada masyarakat yang tinggal di kawasan TNK, rentan adanya potensi konflik jika mereka digusur atau dipaksa pindah meninggalkan kawasan TNK tersebut. *(sumber : wawancara denga Suk, Polres Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).*

- Kemungkinan terdapat adanya potensi konflik Pilwali Bontang tahun depan, misalnya adanya demonstrasi, unjuk rasa dari pihak tertentu untuk kepentingan elit politik tertentu (*sumber : wawancara dengan Sur, S.Sos, Lok Tuan, tanggal 20 Agustus 2014*).

b. Aspek Sosial dan Budaya

- Terdapat adanya perubahan kebiasaan/ budaya warga sesuatu etnes ketika memasuki lapangan pekerjaan, misalnya jika yang menjadi pimpinan puncak diperusahaan atau lembaga pemerintah berasal dari etnis tertentu yang sangat kental dengan kekerabatannya, maka pimpinan tersebut akan menempatkan karyawan pada posisi strategis berasal dari etnis yang sama, tentu saja hal ini akan menimbulkan kekecewaan etnis lainnya.
- Terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, hal ini disebabkan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di beberapa perusahaan yang ada di Bontang, antara lain disebabkan oleh faktor pendidikan dan keahlian masyarakat lokal kalah bersaing dengan para pendatang yang mempunyai pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan.
- Terdapat adanya ormas, OKP, LSM atau organisasi lainnya seperti Gepak, PHM, Laskar lainnya di Kota Bontang, agak keras dalam memperjuangkan kepentingan organisasi atau elit tertentu, indikasi muncul fanatisme kedaerahan berlebihan.
- Terdapat adanya masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya di Bontang, hal ini antara lain disebabkan masyarakat lokal termarginalisasi khususnya untuk bekerja disektor swasta/ perusahaan, seperti masyarakat asli Kutai di Guntung, lahan mereka semakin sempit akibat perluasan lahan perusahaan dan mengalami perubahan mata pencaharian.
- Menurut sebagian warga Bontang masih terdapat tumpang tindih lahan antar warga, warga dengan perusahaan dan antar perusahaan di Kota Bontang, misalnya di wilayah PT. LNG Badak, PT. Pupuk Kaltim (PKT) di Loak Tuan.
- Tumpang tindih lahan warga dengan perusahaan terjadi di Bukit Tursina, Sekaming, Bontang lestari (Indominco), PT. Badak LNG.
- Permasalahan ganti rugi lahan di PT. LNG Badak akan menjadi bom waktu terjadinya konflik antara warga dengan pihak perusahaan (*Sumber: dialog kerawanani konflik dgn unsur paguyuban Kota Bontang, tanggal 18 Agustus 2014*)

- Terdapat cara pandang yang berbeda seseorang, kelompok, komunitas terhadap adat istiadat, budaya orang, hal ini merupakan hal yang wajar mengingat terdapat 72 etnis atau paguyuban di Kota Bontang, tentu saja hal ini akan meimbulkan perbedaan pandangan dan persepsi antar masyarakat kota Bontang tetap berlandaskan saling pengertian dan saling menghargai.
- Terdapat adanya ormas, OKP, LSM atau organisasi lainnya di Kota Bontang seperti Gepak, Gasak Libas, Lasykar lainnya.
- Ada sebagian masyarakat lokal termarginalisasi peluang dan usaha secara formal, khususnya bekerja di sektor perusahaan atau sektor pemerintahan di Kota Bontang, termarginalisasi oleh kompetisi dan kompetensi dengan masyarakat yang datang ke Bontang sebagai kota industri.
- Adanya indikasi ketersinggungan perasaan masyarakat lokal terhadap penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu, khususnya pekerjaan di perusahaan/ industri di Bontang.
- Menurut sebagian warga terdapat adanya tumpang tindih lahan antara warga dengan perusahaan sampai saat ini menyisakan masalah adanya pengakuan warga sebagian lahan pabrik LNG milik warga. (*Sumber : wawancara dengan Bapak Shb Dinas Sosial Kota Bontang, tanggal 19 Agustus 2014*).
- Terdapat adanya ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, khususnya bekerja pada sektor swasta atau perusahaan yang ada di Bontang lebih didominasi oleh orang luar jika dibandingkan dengan masyarakat lokal.
- Adanya ormas, OKP dari unsur masyarakat lokal ingin menguasai sebagian tanah TNK , mereka mengakui tanah TNK tersebut milik nenek moyang mereka.
- Masyarakat lokal khususnya saudara kita etnis Kutai dan Dayak sedikit termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya di Kota Bontang.
- Adanya indikasi masyarakat lokal mengalami ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu, misalnya yang menjadi pimpinan diperusahaan atau kantor pemerintahan berasal dari etnis tertentu, maka mereka akan mengajak atau merekrut karyawan berasal dari etnis yang sama.
- Di Kota Bontang terdapat adanya ormas, OKP yang sedikit radikal dan terkadang menjadi provokator di kota Bontang.
- Terdapat tumpang tindih lahan warga dengan pihak pemerintah, misalnya tanah di Pasar Rawa Indah, tumpang tindih lahan warga dengan pihak perusahaan di sekitar tanah PKT (PT. Pupuk Kaltim).

- Peredaran minuman keras di Kota Bontang saat ini masih ada, perlu razia miras yang intensif. (sumber : wawancara dengan Bpk Suk, Polres Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).
- Mengingat majemuknya suku, etnis yang tinggal di Bontang, maka hal yang wajar terdapat cara pandang yang berbeda seseorang, komunitas, kelompok terhadap adat istiadat budaya orang lain.
- Terdapat adanya tumpang tindih lahan saling mengklaim kepemilikan antara warga dengan pihak perusahaan, hal ini terjadi di daerah lahan warga berdekatan dengan lahan perusahaan seperti terkadi di Lok Tuan, Guntung, Berbas Tengah. (sumber : wawancara dengan Nur, Kelurahan Api-Api Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).
- Terdapat adanya kesenjangan tingkat pendidikan antara warga lokal dengan warga yang datang ke Bontang mencari pekerjaan. Faktor kesenjangan lebih disebabkan oleh faktor daya saing dan kompetensi, persaingan alamiah.
- Adanya pengaruh kemajuan kota Bontang kedepan yang berbasis industri, sehingga masyarakat lokal etnis Kutai dan Dayak termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya di Kota Bontang, persaingan yang tidak bisa dihindari.
- Terdapat tumpang tindih lahan antar warga dengan pihak perusahaan, seperti di lahan milik PKT dan LNG Badak. (sumber : wawancara dengan Sur, S.Sos, Lok Tuan, tanggal 20 Agustus 2014).

c. Aspek Keetnisan/Suku

- Terdapat adanya etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya, seperti tanah adat di Teluk Pandan antara etnis dayak dengan bugis. (Sumber: *dialog kerawanani konflik dgn unsur paguyuban Kota Bontang, tanggal 18 Agustus 2014*).
- Terdapat etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya, etnis lokal ingin mengklaim kepemilikan lahan tanah warga lain yang sudah bersertifikat. (Sumber : wawancara dengan Bapak Shb Dinas Sosial Kota Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).
- Adanya etnis lokal, ingin menguasai lahan TNK (Taman Nasional Kutai) milik Negara, sudah ada masyarakat yang tinggal di tanah TNK tersebut.
- Pernah terjadi pelanggaran pemberlakuan hukum adat oleh etnis tator yang tidak tepati oleh etnis bugis denda kerbau, sempat terjadi ketegangan / pemicu konflik antar etnis tersebut (sumber : wawancara dengan Bpk Suk, Polres Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).

d. Aspek Agama

- Terdapat adanya indikasi pelecehan agama, baik beda agama maupun sesama agama yang berbeda aliran di Bontang, misalnya ajaran salafi (ahli bid'ah) lokasi di Pisangan, jalan HM. Ardan.
- Adanya yang merasa eksklusif internal agama misalnya ajaran LDII, Salafi, pelajaran maa'rifat.
- Terdapat adanya indikasi aliran sesat atau aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu, yaitu ajaran ahmadiyah, yang saat ini pengikutnya tersebar di Kota Bontang, seperti di perumahan BTN Bontang dan Gang Karya Gunung Sahari. (*Sumber: dialog kerawanani konflik dgn unsur paguyuban Kota Bontang, tanggal 18 Agustus 2014*).
- Terdapat adanya pelecehan agama baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan hal ini terjadi tetapi belum sampai keluar. Contoh lainnya agama lain membangun tempat ibadah yang bukan wilayahnya, mayoritas agama lain sehingga terjadi penolakan pembangunan tempat ibadah tersebut, rawan terjadinya potensi konflik antar penganut yang berbeda agama tersebut. (*Sumber : wawancara dengan Shb Dinas Sosial Kota Bontang, tanggal 19 Agustus 2014*).
- Terdapat aliran sesat yang menyimpang dari kelompok agama tertentu, misalnya di Lok Tuan sesama agama Kristen, kelompok agama Islam adanya aliran ahmadiyah, LDII dll. (sumber : wawancara dengan Bpk Suk, Polres Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).
- Adanya perasaan eksklusif merasa hebat dari suku tertentu di Kota Bontang. (*sumber : wawancara dengan Suri S.Sos, Lok Tuan, tanggal 20 Agustus 2014*).

e. Aspek Batas Wilayah

- Batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur, menurut pendapat masyarakat sampai saat ini belum selesai, tepatnya di daerah Sidrap. Secara hukum daerah Sidrap termasuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sebagian besar penduduk sidrap bekerja di Bontang, karena daerahnya lebih dekat ke Bontang
- Sebagian penduduk Sidrap memiliki KTP ganda dan pernah dimanfaatkan untuk kepentingan politik calon tertentu pada pilwali Bontang sebelumnya. Pendapat masyarakat di daerah Sidrap, mereka ingin menjadi penduduk Kota Bontang.
 - Adanya indikasi potensi konflik antar warga berkaitan dengan batas wilayah, kemungkinan terjadinya pengerahan massa (*Sumber: dialog kerawanani konflik dgn unsur paguyuban Kota Bontang, tanggal 18 Agustus 2014*).

- Batas wilayah Bontang dan Sanggatta sampai saat ini belum selesai, di daerah Sidrap sebagian besar masyarakat Sidrap ingin bergabung dengan Kota Bontang, tetapi disisi yang lain dari aspek yuridis daerah sidrap tetap menjadi milik Pemkab Kutai Timur. *(Sumber : wawancara dengan Shb Dinas Sosial Kota Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).*
- Adanya perbedaan pendapat/ persepsi masyarakat berkaitan dengan batas wilayah Bontang dengan Kutim, di daerah Sidrap, secara hukum daerah Sidrap termasuk wilayah Kutim, masyarakat Sidrap ingin menjadi warga Bontang karena jaraknya lebih dekat dan bekerja di Bontang *(sumber : wawancara dengan Suk, Polres Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).*
- Adanya perbedaan pendapat/ persepsi berkaitan dengan batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah, seperti di Sidrap batas wilayah antara Bontang dengan Kutai Timur, masyarakat Sidrap ingin menjadi penduduk kota Bontang karena jarak lebih dekat dan sebagian besar warganya bekerja di Bontang, namun disisi yang lain secara hukum yuridis, daerah Sidrap termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur. *(sumber : wawancara dengan Sur S.Sos, Lurah Lok Tuan, tanggal 20 Agustus 2014).*

f. Aspek Geografis (Bencana Alam)

- Lokasi Banjir yang cukup parah di Kota Bontang antara lain : di Kelurahan Satimpo, Kanaan, Pisangan, Kecamatan Api-Api, Gunung Eki dan Gunung Sahari.
- Lokasi Tanah longsor di Kelurahan Kanaan dan Kecamatan Bontang Barat penyebabnya adalah karena adanya eksploitasi galian C
- Lokasi Kebakaran hutan di Bontang lestari dan Hutan Lindung (Taman Nasional Kutai).
- Lokasi Angin Topan, Angin putting beliung di Kecamatan Bontang Selatan. *(Sumber: dialog kerawanani konflik dgn unsur paguyuban Kota Bontang, tanggal 18 Agustus 2014).*
- Lokasi Banjir di Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat dan Bontang Selatan.
- Lokasi Tanah longsor di Bontang Utara karena lahan gundul dan dibawah bukit.
- Bahaya kebakaran di Lok Tuan, berbas pantai, Tanjung Laut, berbas tengah, Tanjung Laut indah dan Bontang Baru. *(Sumber :*

wawancara dengan Shb Dinas Sosial Kota Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).

- Banjir terjadi di Kelurahan Api-Api dan Telihan
- Kebakaran hutan di Kelurahan Bontang Lestari
- Angin puting beliung terjadi di Lok Tuan, Bontang Kuala, berbas depan kantor BRI jalan separko.
- Kebakaran sering terjadi di Bontang terutama dikawasan permukiman padat bangunan dan padat penduduk seperti di Lok Tuan, Berbas Pantai dan Bontang Kuala. *(sumber : wawancara dengan Nur, Api-Api Bontang, tanggal 19 Agustus 2014).*

2. Penyajian Data Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Aspek Politik

- Terdapat adanya potensi konflik akibat Pilkada/ Pilbup di Kukar dengan hasil perolehan suara di Kukar yang keberatan dengan caleg yang lolos tapi tidak memenuhi ketentuan dan bermasalah dengan hukum.
- Sudah menjadi rahasia umum di Tenggarong siapa parpol yang menang dan berkuasa. Pengerahan massa saat kampanye, pelaksanaan pemilu juga diwarnai acara bagi-bagi sejumlah uang pada masyarakat.
- Terdapat kesenjangan pembangunan infrastruktur antar daerah, kecamatan dan kelurahan seperti kecamatan Sebulu, Muara Wis, Tabang, Anggana, Kenohan desa Sambera Baru dan di desa-desa dimana pembangunan masih lamban terutama jalan, listrik dan air bersih. Selain itu kualitas pekerjaan yang rendah, menyebabkan cepat rusak fasilitas yang dibuat membuat susah masyarakat.
- Di desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, sudah 14 tahun mengajukan permohonan ke Pemda untuk pengadaan listrik tapi sampai sekarang belum ada realisasi.
- Penduduk di Jonggon B dan C belum mendapat pasokan listrik, padahal kawasan itu tidak begitu jauh dari Tenggarong, ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini membuat masyarakat kecewa dengan janji PLN yang akan menuntaskan persoalan listrik di Jonggon, tapi belum terealisasi (sumber Katim Post, 3 September 2014).
- Masyarakat Kecamatan Muara Badak dan Merangkayu menganggap pemerintah kurang respon kepada pembangunan di wilayah pesisir.
- Desa Sambera Baru Kecamatan Merangkayu, yang membawahi tiga dusun diantaranya, Manunggal Jaya 1, Manunggal Jaya 2 dan

Marga Mulyo belum tersentuh jaringan listrik selama 30 tahun dan mengalami krisis air bersih. Hal ini sangat ironis memang apa yang terjadi pada saudara kita yang berada di Sambera Baru, yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang dan Kab. Kutai Timur (Kutim) ini, belum mempunyai penerangan listrik selama 30 tahun (sumber : diunduh pada tanggal 8 September 2014)

<http://www.dprdkutaitanegara.go.id/bacawarta.php?id=1917>.

- Ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat terutama terjadi pada kecamatan yang punya potensi ekonomi tinggi seperti pertambangan dan perkebunan (Contoh Kecamatan Loa Kulu, Muara Muntai, Tenggarong Sebrang). Misalnya dalam hal pemegang ijin usaha pertambangan dan perkebunan di lokasi yang sama, kebijakan dalam pembuatan ijin eksplorasi tambang dan ijin perkebunan tidak memperhatikan kepemilikan tanah masyarakat, dan kebijakan pembukaan lahan tambang tidak memperhatikan tata ruang dan dampak lingkungan
- Ada konflik dalam hal pembuatan PPAT. Pembuatan Surat PPAT tanpa peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh Tim yang terkait dan yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat. PPAT dibuat pada lahan yang ada pemilik secara sah sehingga terjadi complain antara pemilik tanah dan pembeli yang disebabkan oleh oknum tersebut. Kejadian ini terjadi di Kelurahan Timbau dan Rapak Mahang Tenggarong.

b. Aspek Sosial dan Budaya

- Terdapat cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok /komunitas terhadap adat istiadat budaya orang lain, seperti di desa Jahab adanya adat Kuwangkai suku dayak yang merupakan upacara adat berupa arena judi namun bertentangan dengan agama dan peraturan perundangan sehingga meresahkan masyarakat sekitar (sumber Kesbangpol Kukar Agustus 2014)
- Ada indikasi pemaksaan perubahan budaya warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja, dimana warga etns tertentu yang mau bekerja harus melalui forum/ormas/ kelompok tertentu terlebih dahulu.
- Telah terjadi penggunaan IPTEK sehingga terjadi perubahan dratis pada mata pencaharian pada tatanan ekonomi terutama nelayan yang menggunakan satelit dalam pencaharian ikan.
- Adanya Ormas /OKP/ organisasi lainnya yang memiliki faham radikal dan kekerasan dengan menjamurnya ormas-ormas ke daerah yang cenderung menjadi komplik ketika ormas menjadi alat oleh perusahaan/warga dalam penyelesaian masalah.
- Terdapat ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu, terutama kawasan yang memiliki perusahaan tambang dan perkebunan (Misalnya Kecamatan Tabang). Masyarakat di sekitar perusahaan sering menuntut untuk diterima

kerja di perusahaan tersebut, karena perusahaan selalu menerima pekerja dari luar wilayah sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

- Keberadaan kegiatan pertambangan batubara secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku masyarakat di sekitar area pertambangan. Keberadaan karyawan pertambangan yang sebagian besar berasal dari luar daerah dan kurangnya interaksi dengan pasangan menimbulkan pemenuhan akan kebutuhan seksual dari pihak lain dalam hal ini adalah dari Pekerja Seks Komersial (PSK), alkoholisme, dan pertikaian antargeng (Pudjiastuti, 2005). Kebutuhan akan PSK membuat seakan-akan seperti adanya hukum permintaan dan penawaran sehingga membentuk “pasar” dalam hal ini timbulnya praktek prostitusi yang dilegalkan menurut hukum hingga keberadaan lokalisasi dapat berkembang di Kelurahan Loa Ipuh Darat. Sebagian masyarakat yang sanak saudaranya bekerja di pertambangan, merasa bahwa dengan kerabatnya bekerja di pertambangan maka ikatan saling membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari berkurang karena harus bekerja di pertambangan batubara. Keberadaan kegiatan pertambangan batubara ini memicu timbulnya mentalitas masyarakat yang lebih cenderung individualistis, materialistis, tercampurnyakebudayaan asli dengan kebudayaan modern,serta hubungan kekerabatan warga masyarakat mulai merenggang (sumber hasil penelitian : Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat,Tenggarong, Kutai Kartanegara oleh Dedek Apriyanto Dan Rika Harin).
- Terdapat propokasi dan propokator lokal, daerah, pusat hingga international pada daerah konflik yang melibatkan oknum ormas tertentu seperti masalah sengketa lahan.
- Adanya tumpang tindih lahan antar warga, antar warga dengan pihak perusahaan, antar perusahaan kebanyakan melibatkan perusahaan perkebunan dan pertambangan dengan masyarakat sekitar, maupun masyarakat adat. Seperti di Ma. Kaman, Ma. Badak, Kembang Janggut dan Tenggarong. Banyak kasus tumpang tindih lahan yang ditumpangangi oleh oknum ormas tertentu.
- Adanya kasus tanah hibah dari kepala adat yang dijadikan dasar gugatan, sementara dasar hukum secara kasat mata tidak berkekuatan hukum.
- Hampir disemua kecamatan terindikasi adanya peredaran miras dan narkoba, seperti peredaran sabu di rutan Tenggarong yang berhasil digagalkan. Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Narkoba yang beredar diperoleh dari bandar di Kota Samarinda. Di Tenggarong banyak toko-toko yang menjual miras yang katanya sudah memiliki

ijin dari Pemda, tentu hal ini sangat bertentangan dengan agama dan mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.

c. Aspek Keetnisan/Suku

- Terdapat etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya seperti di Muara Badak, Anggana dan Samboja dimana Adanya kecenderungan ormas Dayak sering mengklaim penguasaan lahan dengan mengatasnamakan hak ulayat.
- Ada intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hak ulayat/adat etnis tertentu dimana Pemerintah dalam mengeluarkan ijin usaha tidak memperhatikan lokasi usaha tersebut apakah ada hak ulayat masyarakat di dalamnya (tumpang tindih lahan).

d. Aspek Agama

- Adanya aliran sesat/aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu seperti adanya aliran agama Baha'i di Tenggarong. Dimana menurut pengikut Baha'i, mereka bukan aliran tapi agama. Meski Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifudin sudah mengakui Agama Baha'i sebagai agama di Indonesia, namun Kemenag Kutai Kartanegara (Kukar) belum bisa mengambil sikap. Pasalnya, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur soal agama Baha'i tersebut. Untuk diketahui, Indonesia sebelumnya hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Berkas ttg agama Baha'i sudah diserahkan ke Kejaksaan Kukar. (sumber : <http://muslimdaily.net/berita/belum-ada-regulasi-terkait-agama-bahai.html> dan MUI Kukar)
- Adanya cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok/komunitas/ negara tertentu terhadap nilai agama seperti aliran Masitah, dimana aliran ini berasal dari seorang nenek yang mengaku Islam tapi membolehkan meninggalkan salat lima waktu yang penting ingat kepada Allah sudah dianggap cukup. Pengikut aliran ini hanya berjumlah belasan orang namun sudah tidak ada lagi di Balikpapan. Dulunya, aliran ini bermarkas di belakang Gedung DPRD Balikpapan. Aliran ini sampai berita per Februari 2014 masih beredar di Tenggarong. (Sumber : Balikpapan Post 19 Februari 2014).
- Organisasi *Khilafatul Muslimin* yang baru saja menyebar di KM 7, Kelurahan Jahab, Tenggarong dinilai ilegal. Sebagai organisasi, Khilafatul Muslimin belum mengantongi legalitas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Aliran ini menganggap ormas Islam yang ada di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) adalah

aliran yang salah Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Kutai (Sumber : MUI Kukar 22 Agt 2014 dan <http://www.muslimedianews.com/2014/08/polres-kukar-kelompok-khilafatul.html> diunduh pada tanggal 1 September 2014).

e. Batas Wilayah

- Adanya batas wilayah yang melanggar daerah lain seperti (1) Kota Samarinda dan Kab. Kukar; (2) Kecamatan Loa Janan – Samarinda (Desa Tani Bakti dan Desa Batuah); (3) Kec. Air Putih, Kec. Sungai Kunjang dan Kec. Tenggarong Sebrang, Desa Pinang dan Gn, Kapur; dan (4) Samboja dan Balikpapan (Kel. Salok Api Darat, Kel. Gunung Tembak, Kec. Balikpapan Timur. Potensi konflik yang ditimbulkan berkaitan dengan pertanahan menjadikan kesulitan dalam hal permohonan hak atas tanah. Justru berdasarkan perbedaan persepsi inilah sering terjadi klaim akan batas wilayah Kabupaten/Kota dan antar desa/Kelurahan. Seperti permasalahan batas wilayah antara kab. Kukar dengan Kota Samarinda Desa Tani Bakti Loa Janan dengan Kecamatan Palaran Kota Samarinda (Sumber BPN Kukar, Agustus 2014)
- Adanya perbedaan pendapat/persepsi tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah berkaitan batas wilayah. Batas wilayah tersebut adalah Balikpapan dan Kukar, Samarinda – Kukar. Secara umum disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan unsur asset, daya alam, pendapatan desa/kelurahan dan unsur kedekatan dengan kota besar.
- Ada indikasi potensi konflik antar warga berkaitan dengan batas wilayah terutama di Kukar – Samarinda dan Kukar – Bontang. Potensi konflik diakibatkan adanya perubahan wilayah akibat penggabungan dan pemekaran yang tidak diperjelas pemasangan tanda batas. Adanya kemungkinan konflik antar warga terutama apabila lahan memiliki nilai ekonomi dan dipropokasi oleh pihak ketiga.
- Ada tumpang tindih lahan antar warga, antar warga dengan perusahaan untuk perusahaan di Desa Muara Kaman dan Kecamatan Muara Kaman. Area kawasan yang diperuntukkan warga transmigrasi yang dipinjam pakaikan perusahaan untuk kebun sawit oleh perusahaan.

f. Aspek Sumber Daya Alam

- Adanya konflik antara pemerintah dengan rakyat, antara lain bersumber dari eksploitasi SDA atau invertensi kebijakan/regulasi. Konflik terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap lahan masyarakat. Biasanya terjadi pada daerah kecamatan yang memiliki tambang.
- Pengusaha tambang batu bara di Kutai Kartanegara (Kukar) sering mengabaikan pengelolaan lingkungan lebihutamakan keuntungan

yang didukung. Penegakkan Hukum terkesan mandul. Ratusan perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Kukar kerap menjadi keluhan warga sekitar. Hal tersebut muncul karena aktivitas mereka yang kurang peduli terhadap dampak lingkungan. Sudah banyak laporan masyarakat yang masuk dan disampaikan kepada Pemerintah selaku pihak pemberi izin, namun sangat sedikit dari laporan tersebut mendapat respon apalagi mendapat tindakan hukum yang tegas pelaku bisnis emas hitam ini, tidak heran kalau pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah itu terbilang cukup parah.

- Salah satu kasus pencemaran lingkungan dan konflik warga akibat penambangan belakangan ini dialami warga Desa Buana Jaya dan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dimana wilayah tersebut ada sejumlah perusahaan tambang batubara yang belum maksimal memberikan kontribusinya pada warga masyarakat sekitar tambang, diantara sejumlah perusahaan tambangan yang berada di kedua Desa tersebut antara lain PT Jembayan Muara Bara(JMB) , PT.KPUC dan yang baru buka (produksi) PT Kutai Makmur Insan Madiri (KMIM) ke tiga perusahaan ini beroperasi. (Sumber Sinar Harian <http://www.sinartopan.com/2014/06/konfensasi-tambang-tak-sebanding-dengan.html> diunduh pada tanggal 4 September 2014)
- Terjadinya kesenjangan sosial sosial dan ekonomi antara warga lokal dengan pendatang dalam penguasaan SDA. Hal ini terjadi pada setiap kecamatan yang memiliki usaha tambang, misalnya di Kelurahan Loa Ipuh Darat Tenggarong. Keberadaan warga pendatang di suatu daerah dapat menimbulkan kecemburuan social karena kesenjangan ekonomi antara warga lokal dengan warga pendatang, berkaitan dengan peluang untuk bekerja di perusahaan pertambangan. Terdapat beberapa pendapat dari masyarakat bah wawarga lokal tidak merasakan dampak positif dari keberadaan perusahaan pertambangan batubara, justru warga pendatanglah yang lebih merasakan dampak positifnya (sumber hasil penelitian : Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat,Tenggarong, Kutai Kartanegara oleh Dedek Apriyanto Dan Rika Harin).
- Ada kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi tambang dan lahan warga. Dengan banyaknya ijin perusahaan batubara di Kukar (Tenggarong Seberang adalah kecamatan yang memiliki izin pertambangan batu bara yang sangat luas. Tak kurang 60 perusahaan beroperasi), menyebabkan banyaknya lahan tidur warga, seperti di Desa Bukit Pariaman, Buana Jaya, dan Mulawarman, di Kecamatan Tenggarong

Seberang. Irigasi untuk mengalir sawah petani adalah Bendungan Sungai Lampiri di Bukit Pariaman. Namun, kandungan lumpur sungai sudah sangat pekat. Untuk diketahui, aktivitas pertambangan di Tenggara Seberang, Kukar, dituding menambah buruk daerah aliran sungai (DAS). Bahkan, dari laporan masyarakat biota di sungai tersebut, sudah tak mampu hidup. Selepas hujan, ikan mati mengambang. Hujan semakin menambah buruk kualitas sungai membuat masyarakat tak berani menggunakan air sekalipun untuk mencuci. Kekeruhan air sangat tinggi. Lingkungan di sekeliling sawah sudah banyak yang terbuka sehingga limpasan air menimbulkan banjir dan panen bisa terus-terusan gagal

(<http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/84274-makin-sulit-cetak-sawah-baru.html>)

- Ada angkutan perusahaan yang menggunakan lahan/ jalan warga setempat seperti yang terjadi pada sepanjang jalan poros Loa Kulu – Loa Janan dimana warga mengeluhkant tebalnya debu dari aktivitas perusahaan tambang batu bara.
- Hilir mudik kendaraan roda besar dan alat berat melintas di jalan umum di Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang.

g. Aspek Geografi

- Banjir yang terjadi di beberapa kecamatan Kukar pada Januari 2014 yang menyebabkan banyak rumah warga terendam dan sebagian warga ada yang mengungsi disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi dan air pasang tinggi di sungai Mahakam (Sumber BPBD Kukar)
- Potensi kebakaran hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak terlepas dari upaya pembukaan lahan yang dilakukan oleh warga secara tradisional. Pembakaran lahan oleh masyarakat untuk bercocok tanam akan membahayakan hutan yang sudah ditetapkan sebagai hutan lindung oleh pemerintah. Kepala UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kukar, Aswadiansyah mengatakan pihaknya sering melakukan patroli guna mengantisipasi kebakaran hutan ke kecamatan-kecamatan. Intensitasnya bergantung pada tingkat kerawanan kebakaran hutan. Hutan yang rawan kebakaran, jelas Aswadiansyah, terletak di kecamatan Muara Kaman, Sebulu, dan Samboja. Bukan karena kebakaran lahan, tetapi masyarakat sendiri yang sengaja membakar untuk kepentingan bercocok tanam. “Tapi kadang-kadang merambat ke hutan karena angin kencang,” ungkapnya. Luasnya wilayah Kukar menjadi tantangan tersendiri. Namun, sejak adanya satelit NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*), pantauan titik hotspot menjangkau seluruh wilayah di Kukar. Sejauh ini sudah 151

kali deteksi yang dilakukan oleh satelit tersebut. Kalau terjadi kebakaran hutan, kata dia, pihak kecamatan akan melapor ke UPTD. Saat patroli, kadang-kadang ditemukan kebakaran hutan. Petugas patroli sebanyak 10 orang, didominasi kaum perempuan. “Kendala utama di lapangan adalah mobil yang sudah tua. Mobilnya sudah 14 tahun yang sering mogok (sumber : <http://m.korankaltim.com/pemantauan-terbantu-oleh-satelit-noaa/>.)

- Terdapat 112 titik api di Kukar yang terdeteksi oleh UPTD Ppengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) yang akan menyebabkan darurat bencana asap.
- Pernah terjadi angin Putting Beliung Di Samboja Kuala (Januari 2014), Desa Bukit Pariaman dan Desa Kerta Buana Kec. Tenggara Sebrang (Feb 2014) yang menyebabkan kerusakan rumah penduduk, sekolah dan keramba ikan. Pada bulan Mei 2014 angin putting beliung juga melanda Dusun Sebuntal Kec. Marang Kayu yang menyebabkan 1 orang meninggal (sumber BPBD Kukar)
- Musibah angin puting beliung menghantam sebanyak 68 rumah warga Dusun Pulau Mas, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), sekira pukul 15.00 Wita, Kamis (18/9/2014). Akibatnya sebanyak 112 warga tinggal di RT 02, 03, 04 dan 05 Desa Bhuana Jaya itu harus diungsikan (Sumber : <http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/9/37315>).

3. Penyajian Data Kecamatan Balikpapan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa responden / informan diperoleh deskripsi tentang indentifikasi faktor penyebab daerah rawa bencana sosial di Kecamatan Balikpapan Barat dilihat dari aspek sebagai berikut :

a. Aspek Sosial & Budaya

- Di Kecamatan Balikpapan Barat, terdapat tumpang tindih lahan antar warga atau warga dengan perusahaan, umumnya terjadi di kawasan industri atau kawasan baru terbangun, seperti tanah KIK di Kariangau berbatasan dengan Karang Joang. Dimana pihak tertentu memanfaatkan ormas-ormas lokal yang ada untuk pengamanan tanah.
- Salah satu penyakit sosial yang sangat rawan di Kecamatan Barat terutama di daerah pinggiran masih terdapat peredaran minuman keras (miras) illegal oleh kios-kios, pedagang-pedagang ilegal di Kelurahan Baru Tengah, Baru Ulu, baru ilir (sumber : wawancara dengan TKST Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).

- Adanya monopoli dari etnis tertentu berasal dari luar Kalimantan terhadap hajat hidup masyarakat banyak seperti di pelabuhan/ melawai Balikpapan masyarakat lokal memprotes sikap arogan etnis tersebut.
- Di Kecamatan Balikpapan Barat terdapat peredaran minuman keras (miras) di kalangan masyarakat di Kota Balikpapan, miras berasal dari kiriman kapal-kapal di pelabuhan. *(Sumber : Dialog Dengan Unsur Masyarakat dan Pemuda KBBKT Kota Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2014).*
- Adanya keberadaan etnis tertentu dari luar Kalimantan mengakui tanah pantai dan empang menjadi miliknya pada hal baru saja tinggal di Kecamatan Balikpapan Barat. *(Sumber : Tokoh Etnis Dayak Kenyah. Dialog Penanganan Konflik di Balikpapan. FKDM Prov Kaltim, tanggal 25 Juni 2014)*

b. Batas Wilayah

- Adanya perbedaan pendapat atau persepsi tentang batas wilayah antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kelurahan Kariangau sungai kenaitas. *(sumber : wawancara dengan Bapak Putu Gede W. TKST Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).*

c. Geografis (potensi rawan bencana alam)

- Lokasir rawan kebakaran di Kecamatan Balikpapan Barat di Kelurahan Margasari, Kampung baru dan Kampung baru ulu.
- Lokasi Tanah longsor : Kelurahan Baru Ulu, dan baru tengah *(sumber : wawancara dengan Ibu Hj. Intan. Dinas Sosial Kota Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).*
- Lokasi rawan kebakaran di Kecamatan Balikpapan Barat, antara lain di Kelurahan Baru Tengah, Baru Ilir, Baru Ulu, Margasari dan MargoMulyo. Didaerah permukiman padat penduduk.
- Lokasi rawan angin puting beliung terutama di kawasan pinggir pantai di Kelurahan Baru Ulu, Baru Ilir dan Margasari. *(sumber : wawancara dengan TKST Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).*
- Lokasi rawan Banjir di Kecamatan Balikpapan Barat seperti di Kelurahan Baru Ilir dan Margasari.

- Lokasi rawan kebakaran di daerah permukiman padat dan kumuh seperti di Kelurahan Baru Tengah, Baru Ilir, Baru Ulu, Margasari dan Margomulyo. (sumber : wawancara dengan Bapak Priyo. Sekcam Balikpapan Barat, tanggal 21 Agustus 2014).
- Lokasi rawan tanah longsor di Gunung Rambutan Kelurahan Karang Rejo. Kelurahan Sumber Rejo, di Bukit Samirahan, Gunung Guntur. Di Kel Telaga Sari perbatasan Unocal kel Prapatan.
- Kesimpulan Kecamatan Balikpapan Barat rawan konflik sosial terutama berkaitan dengan pemicu, Minuman Keras anak-anak muda, dan Narkoba. (sumber : wawancara dengan Syah, Kesbangpol Kota Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).

d. Aspek Politik

- Kemungkinan adanya gejala potensi konflik pada Pilwali yang akan datang di Kota Balikpapan berupa gesekan-gesekan kecil antar pendukung calon maupun partai politik.
- Kemungkinan adanya indikasi perebutan kekuasaan antar elit politik yang melibatkan massa banyak, mengingat di internal partai ada tokoh vokal Balikpapan yang ingin menjadi walikota yang mempunyai massa yang banyak. (sumber : wawancara dengan TKST Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).
- Adanya gejala riak-riak kecil menjelang Pilwali Kota Balikpapan tahun depan.
- Kemungkinan adanya perebutan kekuasaan antar elit politik melibatkan massa untuk kepentingan politik tertentu.
- Adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap penerbitan sertifikat tanah oleh BPN, terutama pantai-pantai yang sebagian sudah ada sertifikat dimiliki oleh kelompok tertentu yang dengan kekuasaan. (sumber : wawancara dengan Syah, Kesbangpol Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).
- Kemungkinan adanya potensi kerawanan sosial, akibat Pilwali Kota Balikpapan yang akan datang, khususnya bagi calon yang tidak siap menerima kekalahan atau terjadinya kecurangan baik pada saat penetapan DPT maupun kecurangan perhitungan suara pemilih.
- Adanya indikasi perebutan kekuasaan antar elit politik yang melibatkan massa berkaitan dengan calon walikota Balikpapan yang akan datang, kemungkinan akan terjadi konflik internal partai yaitu

tokoh vokal Balikpapan dengan petahana walikota Balikpapan saat ini.

- Adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada sebagian rakyat, misalnya penguasaan beberapa lahan dipinggir pantai oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, misalnya pembangunan ruko/ mall dikawasan pantai. (*Sumber : Dialog Dengan Unsur Masyarakat dan Pemuda KBBKT Kota Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2014*).
- Potensi terkait konflik yang disebabkan pilkada/Pilwali Kota Balikpapan yang melibatkan masa dalam jumlah yang besar dengan fanatisme berlebihan antar masing-masing pendukung di Balikpapan relatif lebih kecil hal ini dipengaruhi kondisi masyarakat Balikpapan yang cenderung plural. (wawancara dengan AL tanggal 4 November 2013).
- Tumpang tindih kepemilikan tanah warga yang memiliki Sertifikat dengan Warga yang menempati. Sengketa lahan antar warga RT. 50, RT. 53, RT.54 dan RT.98 Gunung Bakaran Kelurahan Gunung Bahagia yang terdiri 400 KK dan 2000 jiwa dengan pemilik sertifikat M.72 dengan luas lahan 3,6 Ha yang dimiliki Sdr. Yuianus Henock.

e. Aspek Sosial & Budaya

- Terdapat adanya monopoli dan eksploitasi orang tertentu terhadap sumber hajat hidup masyarakat banyak, biasanya dilakukan oleh ormas atau OKP tertentu seperti penguasaan lahan parker, sengketa tanah.
- Terdapat adanya ormas, OKP atau organisasi lainnya dalam bertindak agak keras dalam memperjuangkan kepentingan, seperti organisasi Gepak, Garda Sikat, LPA, LADKT, yang di khawatirkan adalah terjadinya gesekan antar ormas yang bisa menimbulkan konflik antar pendukung.
- Terdapat adanya tumpang tindih lahan antar warga atau warga dengan perusahaan, biasanya terjadi di kawasan industri atau kawasan baru terbangun, seperti tanah KIK di Kariangau berbatasan dengan Karang Joang. Dimana pihak tertentu memanfaatkan ormas-ormas lokal yang ada untuk pengamanan tanah.
- Banyaknya organisasi masyarakat yang mengatasnamakan kesukuan tertentu dengan jumlah masa yang besar cenderung meresahkan masyarakat, hal ini berpotensi memicu konflik social di

wilayah Balikpapan. (wawancara dengan AL tanggal 4 November 2013)

- Kawasan rawan peredaran minuman keras (miras) illegal oleh kios-kios, pedagang-pedagang ilegal di Kelurahan Baru Tengah, Baru Ulu, baru ilir (*sumber : wawancara dengan TKST Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014*).
- Adanya indikasi perubahan budaya warga sesuatu etnis tertentu ketika memasuki lapangan pekerjaan, biasa tergantung pimpinan puncak berasal dari etnis tertentu.
- Adanya kesenjangan tingkat pendidikan, masyarakat pendatang lebih unggul pendidikan, sehingga lebih berpeluang memasuki sector formal di Kota Balikpapan.
- Secara umum Kesenjangan pendidikan saat ini relatif lebih kecil, namun tenaga profesional khususnya pada sektor minyak dan gas masih terdapat kesenjangan antara pendatang dan tenaga kerja lokal.
- Sektor minyak dan gas masih menjadi penopang pendapatan dan penyerap tenaga kerja di wilayah Balikpapan, sementara sektor tersebut membutuhkan kualifikasi pekerja yang *skillfull* sementara sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat lokal belum dapat memenuhi kualifikasi yang mempunyai untuk bekerja di sektor minyak dan gas. Selain itu masyarakat kelas menengah kebawah harus mengikuti standart hidup di Balikpapan yang cenderung tinggi.
- Adanya monopoli dari etnis tertentu berasal dari luar Kalimantan terhadap hajat hidup masyarakat banyak seperti di pelabuhan/ melawai Balikpapan masyarakat lokal memprotes sikap arogan etnis tsb.
- Terdapat adanya tumpang tindih lahan di sekitar tanah perusahaan, misalnya di Kecamatan Balikpapan Timur di Kelurahan Manggar, Balikpapan Selatan di Sepinggian, Kel Damai. Kec Balikpapan Utara di Karang joang, Kec Balikpapan Barat di Kariangau.
- Peredaran minuman keras (miras), beredar di Gang Buntu Karang Rejo dan minuman tuak (oplosan) juga beredar di pasaran. (*sumber : wawancara dengan Syah, Kesbangpol Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014*).
- Terjadinya pemaksaan perubahan budaya warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan pekerjaan sifatnya kasuastis, misalnya

bekerja diperusahaan tertentu bagi karyawan perempuan tidak boleh pakai jilbab, menggunakan bahasa daerah tertentu.

- Terdapat adanya ormas, OKP atau organisasi lain mempunyai paham radikal atau kekerasan tergantung kepentingan ormas tersebut misalnya untuk pengamanan atau pembebasan lahan.
- Terdapat adanya ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu, misalnya penguasaan lapangan pekerjaan di pelabuhan, lahan parker motor atau mobil di Balikpapan.
- Dalam beberapa hal yang terkait isu kesukuan, isu putra daerah, menjadi isu yang sangat sensitive di Balikpapan dan dan rentan terhadap provokasi, hal semacam ini sudah beberapa kali terjadi dilapangan namun masih dapat diredam.
- Terdapat adanya tumpang tindih kepemilikan lahan antar warga dengan pihak perusahaan, misalnya di Kelurahan Manggar. Terjadinya overlapping sertifikat tanah, terutama didaerah-daerah yang baru terbangun (pembangunan infrastruktur) dan kawasan bisnis/ industri di Kota Balikpapan.
- Terdapat peredaran minuman keras (miras) di kalangan masyarakat di Kota Balikpapan, miras berasal dari kiriman kapal-kapal di pelabuhan. *Sumber : Dialog Dengan Unsur Masyarakat dan Pemuda KBBKT Kota Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2014).*
- Adanya keberadaan etnis tertentu dari luar Kalimantan mengakui tanah pantai dan empang menjadi miliknya pada hal baru saja tinggal di Kecamatan Balikpapan Barat. *(Sumber : Tokoh Etnis Dayak Kenyah. Dialog Penanganan Konflik di Balikpapan. FKDM Prov Kaltim, tanggal 25 Juni 2014)*
- Terdapat cara pandang yang berbeda antar dua kelompok masyarakat dengan latar belakang suku dayak dan suku bugis hal ini dapat menjadi potensi konflik antar kedua belah kelompok. (wawancara dengan HB tanggal 4 November 2013).

f. Aspek Suku Agama, Ras & Antar Golongan

- Adanya indikasi etnis tertentu ingin menguasai etnis lainnya oleh etnis yang berasal dari luar Kalimantan, misalnya penguasaan lahan

parker oleh kelompok tertentu. (*sumber : wawancara dengan Bapak Priyo. Sekcam Balikpapan Barat, tanggal 21 Agustus 2014*).

- Walaupun tidak secara massif namun beberapa kasus membuktikan ada kelompok suku tertentu yang coba mengklaim wilayah.
- Adanya aliran sesat yang menyimpang dari kelompok agama tertentu di Balikpapan yaitu aliran nabi palsu, ajaran nene buta di Klandasan. (*Sumber : Dialog Dengan Unsur Masyarakat dan Pemuda KBBKT Kota Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2014*).

g. Batas Wilayah

- Adanya perbedaan pendapat atau persepsi tentang batas wilayah antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kelurahan Kariangau sungai kenaitas. (*sumber : wawancara dengan Bapak Putu Gede W. TKST Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014*).
- Permasalahan batas wilayah kerap terjadi dalam beberapa kasus di Balikpapan antara lain; Penetapan Batas Wilayah Antara Balikpapan - PPU dan Balikpapan – Kukar, hal tersebut terus menjadi permasalahan yang berlarut-larut karena hingga saat ini Belum dikeluarkannya keputusan resmi dari Kemendagri yang mengatur tentang penetapan batas wilayah Balikpapan - PPU dan Balikpapan - Kukar.
- Perbedaan persepsi antara warga dan pemerintah mengenai batas wilayah sering ditemui di wilayah Balikpapan antara lain Lahan Lokasi Eks Kebakaram RT. 15, RT.21 dan RT. 22 Kelurahan Damai dengan luas 2,3 H, Di dalam lahan eks kebakaran dimaksud terdapat hak milik nomor 1222 atas nama Sumarno yang telah disita eksekusi oleh pengadilan sebagai aset negara cq. Direktorat Kekayaan Negara dan lain lain Kementerian Keuangan.

h. Geografis (potensi rawan bencana alam)

- Lokasir rawan kebakaran di Kecamatan Balikpapan Barat di Kelurahan Margasari, Kampung baru dan Kampung baru ulu.
- Lokasi Banjir sering terjadi di Kelurahan Damai (Jalan Haryono, MT), Balikpapan Timur di Tritif, Kelurahan Karang Rejo.
- Lokasi Tanah longsor : Kelurahan prapatan, Batu Ampar, Telaga Sari, Graha Indah, Kel Baru Ulu, dan baru tengah (*sumber :*

wawancara dengan Ibu Hj. Intan. Dinas Sosial Kota Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).

- Lokasi rawan longsor seperti di Kelurahan Baru Ulu, Margo Mulyo.
- Lokasi rawan kebakaran di Kecamatan Balikpapan Barat, antara lain di Kelurahan Baru Tengah, Baru Ilir, Baru Ulu, Margasari dan MargoMulyo.
- Lokasi rawan angin puting beliung terutama di kawasan pinggir pantai di Kelurahan Baru Ulu, Baru Ilir dan Margasari. *(sumber : wawancara dengan TKST Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).*
- Lokasi rawan Banjir di Kecamatan Balikpapan Barat seperti di Kelurahan Baru Ilir dan Margasari, di Jalan A. Yani dan Kelurahan Damai
- Lokasi rawan kebakaran di daerah permukiman padat dan kumuh seperti di Kelurahan Baru Tengah, Baru Ilir, Baru Ulu, Margasari dan Margomulyo. *(sumber : wawancara dengan Bapak Priyo. Sekcam Balikpapan Barat, tanggal 21 Agustus 2014).*
- Lokasi rawan tanah longsor di Gunung Rambutan Kelurahan Karang Rejo. Kelurahan Sumber Rejo, di Bukit Samirahan, Gunung Guntur. Di Kel Telaga Sari perbatasan Unocal kel Prapatan.
- Lokasi Rawan Kebakaran yang terbanyak di Kec Balikpapan Barat.
- Lokasi Rawan bencana angin putting beliung di kawasan jalan kelandasan ilir, kelandasan ulu, khususnya didaerah pinggiran laut.
- Kesimpulan Kecamatan Balikpapan Barat rawan konflik sosial terutama berkaitan dengan pemicu, Minuman Keras anak-anak muda, dan Narkoba. *(sumber : wawancara dengan Syah, Kesbangpol Kota Balikpapan, tanggal 22 Agustus 2014).*

4. Penyajian Data Kecamatan Sungai Kunjang

Berdasarkan hasil penelitian dari 10 responden / informan diperoleh deskripsi tentang identifikasi faktor penyebab daerah rawan bencana sosial di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda seperti berikut :

a. Aspek Keetnisan/Suku

- Terdapat etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya. Adanya pembelian lahan cukup luas oleh kalangan mampu, lahan akan dijadikan tempat tinggal etnis tertentu.
- Adanya pelecehan satu etnis ke etnis lainnya, sebatas ejek dan olok sifatnya bergurau.
- Apakah ada pelanggaran hak dan kewajiban lintas etnis yang tidak dipenuhi. Belum ada laporan dari etnis tertentu melapor ke aparat.
- Apakah ada intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hak ulayat/adat etnis tertentu.

b. Aspek Agama

- Adanya pelecehan agama baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan.
Ada oknum dari etnis tertentu dan beda agama, mengatakan ketika subuh tiba terdengar gaung ibadah dari Mesjid/Langgar membuat tidak bisa tidur nyenyak.
- Adanya yang merasa eksklusifisme internal agama maupun suku. Warga etnis tertentu dan agama tertentu cukup eksklusif dilingkungannya. Jarang bergaul dengan warga lokal.
- Adanya aliran sesat/aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu. Jumlah jama'ah pengikut diatas 50. Melakukan ritual/ceramah dari ba'da Isya sampai pagi jam 09.00 esok hari. Menyajikan air dalam toples (layaknya dalam pengobatan tradisional), membakar dupa. Setelah berjam-jam mengikuti acara ritual, hampir semua jama'ah menjadi lupa (ada yang merasuk ketubuh). Guru/pemimpin pakai jubah hijau, sementara semua murid berjubah putih.
- Ada pemaksaan ajaran agama tertentu terhadap agama lainnya. Pendirian pemaksaan rumah ibadah oleh agama tertentu berada dilingkungan mayoritas muslim.
- Adanya cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok/komunitas/negara tertentu terhadap nilai agama. Yayasan Min Haji Sunnah Jakarta, sempat menyampaikan sekilas dalam dakwah di Islamic Center Samarinda, bahwa Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan peringatan sejenisnya adalah perbuatan Bid'ah.

c. Aspek Batas Wilayah

- Adanya batas wilayah yang melanggar daerah lain (mencaplok) daerah lain.
Wilayah Samarinda Kel. Beringin Raya-Pal Besi RT 52, Kel.Loa Buah RT 18 dan Kel.Lok Bahu RT 21 dikuasai Kutai Kartanegara.Warga tiga daerah itu memilih setiap kali ada kegiatan selalu berurusan ke Kutai Kartanegara karena disana mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi desa.
(Sumber : Wawancara dengan SS, tanggal 27 Agustus 2014)
- Adanya perbedaan pendapat/persepsi tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah berkaitan batas wilayah. Warga di tiga RT Kecamatan Sungai Kunjang mengurus surat-surat/administrasi ke Kutai Kartanegara, karena lebih dekat jangkauan dan adanya fasilitas kemudahan yang diberikan oknum tertentu.
- Adanya indikasi potensi konflik antar warga berkaitan dengan batas wilayah. Terkait warga selalu berurusan dengan Kutai Kartanegara, maka pihak Kecamatan Sungai Kunjang menganggap tiga wilayah tersebut status quo.

d. Aspek Sumber Daya Alam

- Pernah adanya konflik antara pemerintah dengan rakyat, antara lain bersumber dari eksploitasi sumber daya alam, atau intervensi kebijakan/regulasi. Sebagai akibat dari warga ditiga RT (wilayah Samarinda) memilih pelayanan administrasi kependudukan di Kutai Kartanegara maka wilayah tsb. menjadi status quo.
(Sumber : Wawancara dengan NR, tanggal 27 Agustus 2014).
- Adanya kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi tambang dengan lahan warga. Kebijakan ini diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kaltim.
(Sumber : Wawancara dengan NR, tanggal 27 Agustus 2014).
- Adanya terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga lokal dengan pendatang dalam penguasaan sumber daya alam. Warga pendatang (kalangan mampu) lebih banyak menguasai sumber daya alam dibanding warga lokal.
- Adanya angkutan perusahaan yang menggunakan lahan warga setempat. Lahan warga yang digunakan untuk jalan tambang sudah diberikan nilai ganti rugi kepada pemilik sesuai kesepakatan.

e. Aspek Geografis (potensi rawan bencana alam)

- Adanya banjir. Didesa Karang Mulya, Bendang (Kel. Lok Bahu), akibat adanya pemotongan bukit. Di Kel. Loa Buah, ada 6 RT akibat adanya pembangunan jembatan Mahulu. Di Kel. Loa Bakung pernah banjir dalam karena adanya pembangunan perumahan dan pemotongan bukit.
- Adanya tanah longsor diakibatkan pemotongan bukit, dipicu hujan lebat terus menerus sehingga tanah bukit longsor menutup sampai ke jalan raya (sifat sementara).
- Apakah ada Kebakaran Hutan. Tidak ada kebakaran hutan, karena hutan sudah ditebang untuk pembangunan perumahan.
- Apakah ada kekeringan. Tidak ada kekeringan, karena didaerah ini wilayah tropis, frekuensi musim panas dan musim hujan seimbang.
- Apakah ada angin Topan. Tidak ada angin Topan.

f. Aspek Politik

- Kemungkinan adanya potensi konflik akibat PILKADA Kota Samarinda yang akan datang, faktor pemicunya antara lain terjadinya perbedaan persepsi dan pendukung antar Tim Sukses, perbedaan kepentingan para calon legislatif, partai politik, adanya oknum-oknum tertentu memanfaatkan moment Pilkada untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
- Adanya indikasi perebutan kekuasaan antar elit politik, yang melibatkan massa banyak untuk meraih kekuasaan elit politik.
- Adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar daerah, kecamatan, kelurahan. Potensi konflik adanya keinginan warga agar wilayahnya maju sama dengan daerah tetangga di Kelurahan Loa Bakung.
- Adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar daerah, kecamatan, kelurahan. Potensi konflik adanya usulan pembangunan diwilayah tertentu, karena mendapat dukungan dari anggota legislatif asal wilayah pemilihannya di Kelurahan Karang Anyar.
- Adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. Terjadi di daerah yang mempunyai potensi ekonomi cukup tinggi dan sarana infrastruktur yang memadai di Kelurahan Karang Anyar.

- Adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. Warga asli yang sudah lama membuka lahan kemudian dikuasai oleh warga pendatang di Kelurahan Loa Buah.
(Sumber : Wawancara dengan SS, tanggal 27 Agustus 2014)
- Adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. Tuntutan warga setempat agar tidak membangun rumah ibadah, karena pengikut agama tertentu jumlahnya minoritas.
(Sumber : Wawancara dengan KY, tanggal 30 Agustus 2014)

g. Aspek Sosial & Kebudayaan

- Adanya terdapat cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok/komunitas/terhadap adat istiadat, budaya orang lain.
Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas tanpa dilindungi vaksin rabies. Menyemayamkan jenazah sehari-hari di rumah duka tanpa memperhatikan adat istiadat budaya setempat (asli lokal).
(Sumber : Wawancara dengan KW, tanggal 27 Agustus 2014).
- Adanya pemaksaan perubahan budaya warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja.
Pertentangan nilai-nilai tradisional/kearifan lokal dengan nilai-nilai modern (westernisasi). Terjadi di kampung yang ada perusahaan tambang.
- Adanya ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, sebagian masyarakat pendatang sukses dalam bidang ekonomi karena masyarakat pendatang lebih tekun, ulet dalam bekerja dan berpendidikan.
- Adanya kesenjangan pendidikan antara masyarakat lokal dan pendatang. Adanya kesenjangan pendidikan antara masyarakat lokal dan pendatang. Masyarakat pendatang umumnya berpendidikan bekerja di sektor tambang dan lebih unggul, umumnya duduk sebagai staf, sementara warga lokal unskill.
- Adanya kesenjangan pendidikan antara masyarakat lokal dan pendatang. Masyarakat pendatang umumnya langsung mencari pekerjaan dan langsung mendapatkannya, mereka lebih mengutamakan dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan sifatnya hanya sementara.
- Adanya Ormas, OKP mempunyai paham agak radikal dan kekerasan. Kebanyakan mereka beraksi sebagai pelindung

masyarakat yang termarginalkan dari perusahaan pertambangan karena ganti rugi tidak memadai.

- Adanya masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya. Masyarakat lokal masih terbiasa dengan adat istiadat lokal, lambat berkembang karena berbenturan dengan peraturan pemerintah dan norma agama. Contoh : Menjadi PKL tidak menempati areal yang dilarang pemerintah.
- Adanya terdapat ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu. Warga tertentu mendominasi pekerjaan skill karena berpendidikan.
- Adanya provokasi dan provokator lokal. Adanya penantangan beradu fisik dari etnis tertentu demi mempertahankan keyakinan agamanya.
- Adanya Ormas, OKP atau organisasi lain mempunyai paham radikal dan kekerasan. Umumnya mereka beraksi dan bertindak sebagai pembela masyarakat yang termarginalkan dari aturan pemerintah, BUMN atau komunitas tertentu.
- Adanya tumpang tindih lahan antar warga, antar warga dengan pihak perusahaan, antar perusahaan. Tumpang tindih lahan warga antara pemilik asal (lokal) dengan warga pendatang di Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Loa Bakung.
- Terdapat peredaran miras dilakukan sembunyi-sembunyi oleh para peminum, dapat menimbulkan konflik yang berujung sara.

5. Penyajian Data Kabupaten Kutai Timur

a. Aspek Politik

- Adanya potensi konflik Pilkada/ Pilbup di Kutai Timur yang faktor pemicunya antara lain : Di Sangatta Utara (penggelembungan suara ada daftar pemilih tetap, DPT/DPK yang tidak valid, ambisi untuk menang suara, banyak surat suara palsu, banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan kartu panggilan memilih (Sumber : Dialog dengan kelompok masyarakat Kutai Timur di Sangatta pada tanggal 22 Agustus 2014)
- Protes ke KPU Kutai Timur di Sangatta Selatan dalam Pemilihan legeslatif sehingga terjadi perkelahian, perselisihan dari partai politik, perkelaian antara petugas TPS dengan para saksi partai politik di Sangkulirang (penggelembungan suara) (Sumber :

Wawancara dengan sekelompok mahasiswa pada tanggal 23 Agustus 2014).

- Kemungkinan terjadi pemicu konflik yaitu adanya perebutan akan sengit lewat pemilukada antara calon menjadi Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kutai Timur karena banyaknya calon yang maju menjadi cabup dan cawabup Kutai Timur (Sumber : Wawancara dengan sekelompok mahasiswa pada tanggal 23 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena ada sebagian kecil penyelenggara Pemilu seperti komisioner KPU Kutai Timur, Panwaslu, para TPS kurang profesional dan ada penyuaian kepada komisioner yang sedang diproses di ranah hukum (Sumber : Jawaban dari angket dengan sekelompok mahasiswa pada tanggal 23 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena adanya kesenjangan pembangunan jalan umum / jalan tembus yang belum tuntas misalnya di Kaubun , Bengalon, Muara Wahau, Sandaran. Pembangunan infrastruktur yang belum merata misalnya di Sangkulirang, Muara Wahau, Kongbeng. Keperluan umum seperti listrik, air bersih dan jalan tembus misalnya di Koubun , di daerah pedalaman dan pesisir sehingga adanya tuntutan dari masyarakat yg merasa daerahnya tidak diperhatikan (Sumber : Jawaban dari angket dengan sekelompok mahasiswa pada tanggal 24 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena Air PDAM yang belum merata antara daerah yang satu dengan yang lain. Daerah di kota mendapat air bersih PDAM seperti Kecamatan kota Sangatta (Utara dan Selatan) dibandingkan dengan Kecaamatan di pedalaaman seperti Koubun, Sangkulirang, Telan, Tepian Pandan, Muara Wahau (Sumber : Jawaban dari angket dengan sekelompok mahasiswa pada tanggal 24 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena tumpang tindih kepemilikan lahan dan tanah ulayat yang dikuasi oleh pihak perusahaan batubara dan kelapa sawit. Pemerintah sering memihak kepada perusahaan. (Sumber : Jawaban dari angket para mahasiswa dengan sekelompok PNS dan pegawai swasta pada tanggal 23 Agustus 2014).

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena masalah Taman Nasional Kutai yang membuat penduduk Sangatta Selatan terkena dampaknya dalam kepemilikan tanah. Adanya indikasi kebijakan pemda yang kurang berpihak kepada rakyat di Kutai Timur. Kebanyakan terjadi di daerah yang punya potensi ekonomi tinggi, kaya tambang, hutan, perkebunan di Kecamatan – kecamatan pedalaman dan pembangunan pelabuhan Kenyamukan di Sangatta Selatan (Sumber wawancara dengan S, A, M, F pada tanggal 25 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena Terdapat adanya kesenjangan pembangunan antar daerah kecamatan maupun desa, misalnya daerah yang tertinggal pembangunannya seperti Sandaran , Muara Wahau dan daerah pedalaman lainnya (Sumber : Wawancara pegawai di Kecamatan Sandaran).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena Hutan Wehea letaknya di Geografis Kecamatan Kong Beng tetapi ternyata di kuasai oleh Kecamatan Muara Wahau. Di Kecamatan Bengalon ada pungli (Wawancara dengan M. Tgl 24 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena adanya tumpang tindih pemilikan lahan seperti antara PT.PERTAMINA dan masyarakat biasa di KM 01 Sangatta Selatan (Sumber : Wawancara seorang pegawai bernama Hr di Sandaran).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena adanya konflik antara masyarakat dan PT.KPC seperti di daerah industri pertambangan di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Daerah konsesi Perusahaan tambang seperti di Bengalon, Muara Wahau dan lain-lain (Hasil angket sekelompok mahasiswa pada tanggal 30 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena Kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga lokal dan pendatang di daerah perkebunan kelapa sawit seperti Koubun, Sangkulirang, Telen, Muara Wahau dan di daerah transmigrasi di Rantau Pulung, Sangkulirang dan Muara Wahau (Hasil wawancara dengan penduduk pada tanggal 30 Agustus 2014).

b. Aspek Sosial dan Kebudayaan

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena cara pandang yang berbeda seseorang /Kelompok / komunitas / terhadap adat istiadat karena terdapat berbagai macam suku di Kutai Timur seperti Dayak, Banjar, Kutai, Jawa, Toraja, Batak, Flores, China dan lain. (Hasil wawancara dengan penduduk pada tanggal 23 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik terdapat berbagai macam pemeluk agama dan Keyakinan seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, aliran kepercayaan, keyakinan dari Nenek Moyang. (Hasil wawancara dengan penduduk pada tanggal 22 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik ada juga prioritas agar PT. KPC ingin memberdayakan suku asli sehingga kadang-kadang perusahaan ini hanya menerima putra asli Kutai Timur sehingga terjadi cemburu sosial antara pendatang dan warga lokal Wahau (Hasil wawancara dengan penduduk pada tanggal 20 Agustus 2014),.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik ada suku tertentu terbiasa sesuai asal mereka yang tidak cocok dengan kebiasaan dan budaya daerah Kutai Timur seperti meminum minuman keras / oplosan , pergaulan yang tidak setuju dan kebiasaan buruk yang diteruskan Wahau (Hasil wawancara dengan penduduk pada tanggal 28 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik cara perusahaan merekrut pegawai yang sesuai standar seperti ijazah, kedisiplinan, ketrampilan dan penampilan sehingga penduduk asli hanya sedikit yang diterima Wahau (Hasil wawancara dengan penduduk pada tanggal 20 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik cara kerja, ketrampilan, pendidikan dan berbisnis dimana para pendatang lebih tinggi dibandingkan penduduk asli Wahau (Hasil wawancara dengan penduduk pada tanggal 27 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik ada komunitas pendatang yang dipertanyakan di Jl.Guru Besar Sangatta Utara yang dapat memicu konflik adalah perbedaan suku Wahau (Hasil wawancara dengan penduduk pada tanggal 26 Agustus 2014)

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, sebagian masyarakat pendatang sukses dalam bidang ekonomi karena masyarakat pendatang lebih ulet dalam bekerja dan berusaha seperti suku Bugis Jawa, Batak, Toraja dan China sementara suku Dayak masih ketinggalan seperti di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Koubun, Sangkulirang, Telen, Muara Wahau Rantau Pulung, Sangkulirang dan Muara Wahau (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik adanya masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya, antara lain disebabkan masyarakat lokal mempunyai tingkatan yang masih rendah menyangkut skill, pendidikan dan modal untuk berusaha sehingga kalah bersaing dengan warga dari luar, sehingga warga lokal termarginalisasi seperti di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Koubun, Sangkulirang, Telen, Muara Wahau Rantau Pulung, Sangkulirang dan Muara Wahau (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 28 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya konflik adanya ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu berasal dari daerah lain seperti Jawa, Bugis dan Toraja yang mempunyai jabatan, pendidikan lebih tinggi dan keahlian tertentu seperti di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Koubun, Sangkulirang, Telen, Muara Wahau Rantau Pulung, Sangkulirang dan Muara Wahau (Hasil jawaban dari wawancara yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 22 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik Adanya peredaran minuman keras (Miras) di kalangan masyarakat, menjual miras secara diam-diam kepada masyarakat di rumahmakan, warung-warung pinggir jalan seperti sepanjang jalan raya Botang – Sangatta yaitu warung tempat karaoke dan night club (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik Terdapat adanya organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, LM, laskar, putra asli pembela Kutim dan seterusnya yang sangat keras memperjuangkan kepentingannya atau kepentingan elit terutama sewaktu pemilukada, perusahaan, usaha bisnis, perijinan dan

perusahaan (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014)

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik Masyarakat lokal seperti Dayak, Banjar, Kutai termajinalisasi peluang ekonomi di Kutai Timur (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pada tanggal 27 Agustus 2014),.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya pembangunan infrastruktur yang rusak seperti Jl. Tapir Kmbo Jaya jalaannya rusak parah, tidak beraspal, banyak lubang, berlumpur dan tidak ada saluran parit irigasi (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu kurang merata pembangunan PDAM di Sangatta Utara / Selatan, Koubun, Sangkulirang, Bengalon, Muara Wahau dan Kongbeng (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu masyarakat kurang peduli akan kebersihan lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit menular, bau busuk dan mengancam keindahan (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014),.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu segelintir orang dari ormas tertentu seperti pembela lingkungan hidup, LSM dan OKP lainnya mejadi provokator terutama mengenai keruakan lingkungan karena kegiatan tambang dan perkebunan kelapa sawit (Hasil jawaban dari wawancara dengan B pada tanggal 13 September 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu daya saing orang lokal kalah telak dari para pendatang dalam berbisnis, menangkap peluang kerja, bidang pendidikan dan penguasaan lahan (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014)

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu pelemban bahwa orang lokal termasuk golongan yang nomor dua atau tiga karena kurang mampu menguasai teknologi(Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu ketidakberdayaan orang lokal menghadapi gempuran investor yang membawa modal dan kemampuan yang tinggi baik sumberdaya manusia , uang dan peralatan canggih(Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan , dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya punahnya makhluk hidup hayati, hewani dan organisme yang lain yang hampir punah karena kegiatan bisnis seperti kegiatan tambang migas, batubara, perkebunan kelapa sawit dan permukiman (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014),

c. Batas Wilayah

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik karena Sertifikat ganda / tumpang tindih kepemilikan lahan dan pemaksaan kehendak / sulit diatur antar kelompok tau perorangan seperti Jl.Pendidikan dan Swarga Bara (Sumber : Wawancara dengan seorang pegawai di kota Sangatta pada tanggal 28 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik Adanya tumpang tindih lahan antar warga, antar warga dengan pihak perusahaan, antar perusahaan, misalnya terjadi perebutan wilayah/ lahan antara Pertamina dengan warga ,PT. KPC dengan warga dan TNK dengan warga (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai swasta , dan pebisnis pada tanggal 23 Agustus 2014 = Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya tekanan dari pemerintah demi perusahaan dengan penerapan undang-undang terutama terkait lahan(Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan , dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014),.

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik penguasaan lahan oleh orang Bugis, Jawa dan China (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014),.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu pendirian rumah-rumah oleh orang Dayak dan Bugis di pinggir jalan yang menjadi pemukiman sehingga TNK terancam habis (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014),.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya fasilitas umum seperti terminal bis, rumah sakit, hotel, penginapan, karaoke, restoran, kantor pemerintah dan bangunan sarang burung walet yang mengancam tanah TNK (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, pegawai perusahaan, dan pebisnis pada tanggal 27 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu 4 (empat) desa di Sangatta Utara dan Selatan tidak termasuk dalam TNK namun belakangan ini terjadi bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghentikan semua anggaran pembangunan infrastruktur di desa-desa tersebut (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, dan pebisnis pada tanggal 22 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya beberapa desa di Sangatta Selatan berada di area hulu minyak dan gas bumi namun belakangan ini terjadi bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghentikan semua anggaran pembangunan infrastruktur di desa-desa tersebut (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS, dan pebisnis pada tanggal 30 Agustus 2014),.

c. Aspek Keetnisan/Suku

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hak ulayat/ adat etnis tertentu, antara lain disebabkan oleh terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah (menggunakan Undang - Undang) dengan masyarakat memakai peraturan hak ulayat (Hasil jawaban dari

angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 22 Agustus 2014),.

- .Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga yaitu adanya etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya, seperti suku Bugis Sangatta yang tinggal di pinggir jalan besar Bontang sehingga terjadi pertentangan dengan orang lokal .
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga yaitu di Era otonomi daerah juga menyebabkan perusahaan dituntut mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak jumlahnya . Tuntutan ini menimbulkan kesulitan bagi perusahaan, tidak hanya karena perusahaan kemudian bekerja tidak efisien, karena kriteria tenaga kerja yang harus diserap sering tidak memenuhi kriteria profesionalitas (Data Kesbang Kutim 2013).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga yaitu adanya inisiatif pembuatan kuburan khusus Toraja di Sangatta Selatan (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga yaitu Perusahaan juga diharapkan memiliki ketegasan terkait penerapan keputusan-keputusan pertemuan. Sekalipun terhadap masyarakat adat. Seperti seharusnya tenaga kerja diambil dari masyarakat asli yang berdomisili di 4 desa di kecamatan Sangatta Selatan. Namun sering kali lembaga adat memberikan rekomendasi atas pencari kerja dari kabupaten lain hanya berdasar etnisitas dan perusahaan seolah memaklumi. Hal ini menimbulkan perasaan tidak adil, bagi sebagian masyarakat yang telah bermukim puluhan tahun di Sangatta Selatan, namun karena problem etnisitas tidak dapat diterima bekerja di Pertamina.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat yaitu adanya penguasaan ekonomi oleh enis pendatang (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014)

d. Aspek Agama

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemeluk agama yaitu terdapat berbagai agama di Kutai Timur agama islam yang dipeluk oleh uku Jawa, Bugis, Banjar dan Kutai (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014).

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemeluk agama yaitu terdapat pendirian rumah ibadah di Kutai mesjid (90 %), gereja Katolik, Gereja Protestan (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014),
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik ada yang merasa eksklusif internal agama maupun suku, hal ini terlihat pada khotbah agama tertentu merasa eksklusif (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 22 Agustus 2014),.
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik adanya aliran sesat/ aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu, yaitu adanya gejala di Sangatta yang berpakaian celana canggung seperti penduduk yang asing di Jl.Guru Besar (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik untuk diwaspadai akan adanya aliran sesat / aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu yang marak diberitakan dalam mass-media akhir-akhir ini . (Hasil jawaban dari angket yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014).

e. Aspek Sumber Daya Alam

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah, perusahaan, LSM dan warga yaitu adanya lubang bekas tambang yang belum direklamasi sesuai keputuan (Hasil pengamatan pada tanggal 15 Juli 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik adanya kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi tambang dengan lahan warga, misalnya menggunakan lahan warga untuk jalur lintas pertambangan dan perkebunan (Hasil jawaban dari wawancara yang diisi oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik ada angkutan perusahaan Kelapa Sawit dan Batubara yang menggunakan lahan warga setempat, terdapat di jalan poros Bontang - Sangatta - Muara Wahau dan sekitarnya .(Sumber : pengamatan di lokasi tanggal 20 sampai dengan 24 Agustus 2014)

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi akibat dari eksploitasi kegiatan perusahaan, mengakibatkan pencemaran, debu, sampah hal ini terjadi hampir semua kegiatan di wilayah tambang terutama di Jl.Jend.Sudirman dan jalan-jalan kota kecamatan. (Hasil jawaban dari wawancara oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga, perusahaan dan pemerintah yaitu pemusnahan seni budaya daerah Dayak dan Kutai karena wilayahnya dicaplok oleh perusahaan batubara dan kelapa sawit misalnya di Muarancalong, Sangkulirang, Miu Baru (Hasil jawaban dari wawancara oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014).
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi akibat dari tumpahan minyak oleh PT.Pertamina di areal pengeboran yang menggenangi daerah sekitarnya di area hulu minyak di sekitar Sangatta Selatan. (Data sekunder dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga yaitu hutan gundul karena penebangan liar dan wilayahnya dicaplok oleh perusahaan batubara dan kelapa sawit misalnya di Muarancalong, Sangkulirang, Miu Baru (Hasil jawaban dari wawancara oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014)

f. Aspek Geografis (Bencana Alam)

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara warga, LSM, perusahaan dan pemerintah daerah, pemerintah pusat yaitu ketidakseimbangan alam karena kegiatan pertambangan dan perkebunan (Hasil jawaban dari wawancara oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu Bencana Kebakaran Hutan pernah terjadi di Muara Batuq thn 2012 (Hasil jawaban dari wawancara oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala bencana alam yaitu Bencana angin topan terjadi di TNK (Hasil pengamatan pada tanggal 28 Agustus 2014)

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu Potensi Bencana Kebakaran pemukiman di Sangatta Utara dan Selatan karena rumahnya berdempet seperti rumah rentang tanpa jarak terutama di pinggir jalan (Hasil pengamatan pada tanggal 23 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu Potensi bencana banjir yang sering terjadi di Sangatta Utara dan Selatan serta di daerah aliran sungai Sangatta karena pasang dan munculnya bangunan bisnis dan pemerintah yang permanen. (Hasil pengamatan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu Potensi Bencana Kebakaran Hutan di Bengalon, TNK, Koubun, Telen dan Muara Wahu (Hasil jawaban dari wawancara oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu Potensi Bencana Kebakaran perkebunan kelapa sawit di Bengalon, TNK, Koubun, Telen dan Muara Wahau (Hasil jawaban dari wawancara oleh mahasiswa, PNS dan pebisnis pada tanggal 29 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tsunami terutama di daerah pantai seperti di Batuputih. (Hasil pengamatan pada tanggal 27 dan 30 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena dilewati truk bermuatan melebihi daya tahan tonase seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta. (Hasil pengamatan pada tanggal 29 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena mutu pemuatan jalan yang tidak sesuai spek seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta. (Hasil pengamatan pada tanggal 30 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena tidak ada parit yang menampung air hujan seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta. (Hasil pengamatan pada tanggal 23 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena jalan yang masih muda seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta. (Hasil pengamatan pada tanggal 24 Agustus 2014)
- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena pondasi kurang kuat seperti di beberapa titik

di jalan poros Bontang Sangatta. (Hasil pengamatan pada tanggal 31 Agustus 2014).

- Keseimbangan alam terganggu kerana kegiatan tambang dan perkebunan kelapa sawit yang sangat rakus terhadap lahan baik terhadap hewan baik kijang, buaya, banteng, babi hutan, gajah dan lain-lain maupun tubuhan seperti ulin, bengkirai, lempung, kapur, anggrek dan lain-lain.

B. Ringkasan Hasil Penelitian

Ringkasan Hasil Penelitian Identifikasi Faktor Penyebab Bencana/ Konflik Sosial di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegera, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kabupaten Kutai Timur.

1. Kota Bontang

No.	Aspek Konflik	Permasalahan	Potensi konflik
A Aspek Politik Sosial dan Budaya			
A.1.	Politik	1) Kemungkinan adanya gejala potensi konflik akibat Pilwali 2015 Bontang yang akan datang, identifikasi penyebabnya antara lain calon walikota atau wakil walikota tidak siap menerima kekalahan, tidak puas dengan hasil perhitungan suara, terjadinya perbedaan persepsi dan kepentingan team sukses calon tertentu, perbedaan partai politik pendukung dan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk rasa melibatkan massa pendukung calon yang tidak siap kalah pada Pilwali Bontang. ▪ Penolakan atau serangan balik terhadap kampanye Black Campaign yang dilakukan oleh calon tertentu, baik langsung maupun di media massa. ▪ Penolakan oleh team sukses terhadap DPT atau perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, jika terdapat indikasi kecurangan oleh pihak yang kalah. ▪ Tuntutan ke jalur hukum/ mahkamah konstitusi bagi calon Pilbub yang kalah.
		2) Tidak adanya implementasi perda Kota Bontang atau Sanksi dari undang-undang bagi masyarakat yang bertempat tinggal illegal di kawasan TNK. Sudah terlambat membuat larangan tinggal di kawasan TNK, permukiman liar terus bertambah di TNK tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat akan melakukan perlawanan kepada pihak terkait jika mereka di paksa pindah tinggal dari TNK. ▪ Tuntutan ganti rugi kepada Pemkot Bontang, jika mereka dipaksa pindah dari TNK. ▪ Provokator akan bermain di air keruh memanaskan suasana agar kota Bontang tidak kondusif.
A.2.	Aspek Sosial dan Budaya	1) Adanya gejala atau indikasi ketersinggungan masyarakat lokal, berkaitan dengan penguasaan lapangan pekerjaan oleh etnis tertentu baik di perusahaan maupun instansi pemerintah, misalnya adanya kecenderungan jika yang menjadi pimpinan berasal etnis tertentu (kesukuan), pada saat penerimaan pegawai berasal dari unsur etnis pimpinan tersebut, hal ini akan menimbulkan kecemburuan atau ketidakadilan yang disarakan oleh masyarakat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan terjadinya aksi protes atau demonstrasi sekelompok masyarakat menuntut keadilan dan transparansi. ▪ Adanya provokator yang bisa mengadu domba, menciptakan suasana kurang kondusif. ▪ Munculnya barisan sakit hati, like and disk like di birokrasi, dan saling melaporkan ke pihak berwajib jika ada indikasi kesalahan.
		2) Terdapat adanya ketidakadilan aspek sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, masyarakat lokal termarginalisasi misalnya karyawan yang bekerja diperusahaan besar di	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan terjadinya aksi demonstrasi menuntut keadilan melibatkan ormas tertentu. ▪ Kebijakan pemda yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

		Bontang di dominasi oleh orang –orang luar. Lahan masyarakat lokal semakin kepinggir untuk kepentingan perusahaan.	
		3) Perusahaan besar yang ada di Kota Bintang seperti PKT dan LNG Badak dan perusahaan besar lainnya, menjadi penopang pendapatan dan banyak menyerap tenaga kerja, sektor tersebut membutuhkan kualifikasi skillfull, sementara disini yang lain SDM masyarakat lokal terbatas tidak mampu memenuhi kompetetensi tersebut sehingga mereka termarginalisasi, disini yang lain standar hidup di Kota Bontang cukup tinggi sebagai daerah industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan jumlah penduduk di Kota Bontang sampai saat ini terus meningkat setiap tahun, perlu kebijakan kependudukan yang baik mengantisipasi hal yang tidak diinginkan
		4) Terdapat adanya Omas, OKP dari etnis tertentu mengarah ke paham radikal di Kota Bontang beratribut militerisme dan mempertahankan adat lokal, seperti lasykar, komando dan gerakan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Munculnya Omas, OKP dari etnis lain untuk penyeimbang atau tandingan melibatkan pemuda atau warga. ▪ Terjadinya persaingan antar omas, OKP melibatkan anggota dengan membayar untuk kepentingan tertentu. ▪ Omas, OKP dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu konflik dgn masyarakat atau sebaliknya.
		5) Menurut informasi sebagian warga Bontang masih terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan (serifikat/ surat-surat tanah) warga dengan perusahaan, hal ini kemungkinan akan menjadi bom waktu konflik antara warga dengan perusahaan misalnya : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Loak Tuan: PT. LNG Badak, dan PT. Pupuk Kaltim - Lokasi di Bukit Tursina, Sekaming, - Lokasi Bontang Lestari (PT. Indominco dan PT. LNG Badak. - Lokasi di Kel Guntung dan Kel berbas Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya klaim/tuntutan warga mendapat perlawanan dari pihak perusahaan didukung oleh Omas atau OKP tertentu.
		6) Timpang tindih kepemilikan lahan antara warga dengan pemerintah, yaitu tahanan Pasar Rawa Indah	Kemungkinan terjadinya konflik horizontal antara warga dengan masyarakat lokal atas nama tanah adat, atau tanah ulayat dan lainnya
		7) Adanya provokasi atau provokator lokal, pemain lama bermain di air keruh, untuk kepentingan kelompok, berkedok ormas. OKP untuk mengacaukan suasana dan memanfaatkan kepentingan oknum tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provokator memprovokasi warga/ propaganda melibatkan warga untuk kepentingan tertentu ▪ Masyarakat terhasut oleh provokasi provokator, terjadinya konflik sesama masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
		8) Terdapat peredaran minuman keras (Miras) di wilayah Kota Bontang di kalangan remaja, khususnya di tempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beredarnya minuman keras dikalangan generasi muda khususnya salah satu pemicu perkelahian antar

		hiburan malam dan sebagian di permukiman warga.	remaja, yang terkadang membawa-bawa nama etnis.
B	Sara (Suku, Agama, Ras & antar Golongan)		
B.1	Aspek Suku, Ras	1) Terdapat adanya etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya di Kota Bontang, misalnya saudara kita etnis Dayak dengan etnis Bugis, klaim tanah adat di teluk pandan, etnis lokal ingin menguasai tanah orang lain yang sudah bersertifikat, Etnis lokal Dayak mengklaim Tanah TNK adalah tanah nenek moyang mereka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadi pertentangan kepemilikan lahan melibatkan massa banyak kedua belah pihak. yang bersengketa. ▪ Aksi provokator lokal menghasut warga dan menimbulkan konflik sosial. ▪ Pihak yang tidak siap kalah di jalur hukum/ pengadilan akan melakukan perlawanan.
		2) Pernah terjadi di Bontang adanya pelanggaran hak dan kewajiban lintas etnis yang tidak dipenuhi. Misalnya denda adat belum dipenuhi oleh etnis tertentu karena denda adat sangat mahal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menimbulkan kekecewaan etnis tertentu terhadap etnis lain, merasa adatnya dilecehkan orang lain. ▪ Penolakan adat tertentu oleh kelompok lain berbeda etnis.
2	Aspek Agama	1) Terdapat indikasi pelecehan agama, baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan di Kota Bontang, misalnya lokasi di Kel Pisangan dan Jalan HM. Ardan adanya ajaran Salafi (ahli bid'ah)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya konflik langsung antar penganut/ pengikut agama yang sama tetapi berbeda aliran kepercayaan.
		2) Terjadinya pembangunan tempat ibadah di lokasi yang bukan mayoritas penganut agama tersebut, terjadi penolakan dari warga setempat yang mayoritas berbeda agama.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya penolakan tempat ibadah oleh warga yang mayoritas berbeda agama karena pembangunan tempat ibadah tersebut tidak sesuai peraturan. ▪ Merasa eksklusif, paling benar sendiri biaya mereka minoritas, mendapat perlawanan dari mayoritas, terjadinya pengusiran ▪ Penyerangan dan pengrusakkan tempat ibadah oleh warga terhadap pengikut yang dianggap menyimpang.
		3) Adanya perasaan eksklusif (paling benar) internal agama maupun suku di Kota Bontang, seperti : LDII, Salafi, Pelajaran Ma'rifat.	
		4) Terdapat adanya aliran sesat atau aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu, yaitu ajaran kepercayaan ahmadiyah yang saat ini pengikutnya tersebar di Kota Bontang, khususnya di Perumahan BTN dan Gang Kaya kel Gunung Sahari. Di Kel Lok Tuan, adanya aliran menyimpang sesama agama Kristen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebaran aliran sesat secara terbuka kepada masyarakat umum.
C	Batas Wilayah		
		1) Terdapat perbedaan pendapat atau persepsi tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah, yaitu di Sidrap merupakan batas wilayah antara Bontang dengan Sangatta. Secara hukum Sidrap termasuk wilayah Kab	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentan terhadap pengerahan massa untuk kepentingan pihak tertentu untuk kepentingan politik.

		Kutai Timur, tetapi penduduk Sidrap ingin bergabung dengan Kota Bontang karena alasan aksesibilitas pelayanan dan mata pencaharian penduduk Sidrap di Bontang.	
		2) Penduduk Sidrap memiliki KTP Ganda (double) Kota Bontang dan Kutai Timur, pernah dimanfaatkan calon tertentu untuk kepentingan politik pada Pilwali Bontang sebelumnya.	▪ Bermainnya provokator untuk mempengaruhi warga setempat untuk bergabung dengan Bontang aatau Kutim.
D. Geografis (potensi rawan bencana alam)			
D.1	Banjir	Lokasi di Kelurahan Satimpo, Kanaan, Pisangan, Api-Api, Gunung Eki, Telihan dan Gunung Sahari.	
D.2	Tanah Longsor	Lokasi, penyebabnya adanya penambangan galian C Kecamatan Bontang Barat kelurahan Kanaan. -Penyebab tanah longsor terjadinya penggundulan tanah di bawah bukit lokasi di Bontang Utara.	
D.3	Kebakaran	Lokasi kebakaran sering terjadi di Bontang terutama di kawasan padat penduduk dan permukiman, seperti di Lok Tuan, Bontang Kuala, depan BRI jalan separko, Berbas Pantai, Tanjung laut, Berbas Tengah, Tanjung laut indah, Bontang Baru dan kebakaran di Hutan Lindung TNK.	
D.4	Angin Putting Beliung	Bencana angin putting beliung di Kecamatan Bontang Selatan, Lok Tuan, Bontang Kuala.	

2. Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Aspek Konflik	Permasalahan	Potensi konflik
A Aspek Politik Sosial dan Budaya			
A.1.	Politik	1) Terdapat adanya potensi konflik akibat Pilkada/ Pilbup di Kukar dengan hasil perolehan suara di Kukar yang keberatan dengan caleg yang lolos tapi tidak memenuhi ketentuan dan bermasalah dengan hukum.	Masalah ini sudah tergantikan dengan calon lain di bulan Agustus 2014.
		2) Sudah menjadi rahasia umum di Tenggarong siapa parpol yang menang dan berkuasa. Pengerahan massa saat kampanye, pelaksanaan pemilu juga diwarnai acara bagi-bagi sejumlah uang pada masyarakat.	Potensi konflik akan terjadinya <i>money politic</i> , membuat partai yang kalah suara akan meradang, dan membuat laporan ke KPU, dan media. Tapi biasanya hal tersebut tidak ada wacana atau berita yang relatif signifikan tentang pengaduan-pengaduan yang sedang terjadi oleh pihak tertentu terhadap

			seorang (atau kandidat mana saja) ke berbagai instansi penegak hukum
A.2.	Aspek Sosial dan Budaya	3) Terdapat kesenjangan pembangunan infrastruktur antar daerah, kecamatan dan kelurahan seperti kecamatan sebulu, muara Wis, Anggana, Kenohan Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, wilayah pantai, Kecamatan Merangkayu, dan desa-desa. Dimana pembangunan masih lamban terutama jalan, listrik dan air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya unjuk rasa yang menuntut kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. • Kecemburuan pada kota / kecamatan yang bertetangga dengan fasilitas listrik yg belum teraliri listrik selama 14 dan 30 tahun
		4) kesenjangan pembangunan infrastruktur juga disebabkan oleh Keterbatasan anggaran Pemda	Masyarakat merasa tidak puas dengan kualitas pekerjaan yang rendah
		5) Ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat terutama pada semua kecamatan yang memiliki potensi tambang dan lahan perkebunan. Pemegang ijin usaha pertambangan dan perkebunan di lokasi yang sama; Kebijakan pembukaan lahan tambang tidak memperhatikan tata ruang dan dampak lingkungan	Konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan, atau juga terjadi antar masyarakat yang sama-sama mengklaim.
		6) Kebijakan dalam pembuatan ijin eksploitasi tambang dan ijin perkebunan tidak memperhatikan kepemilikan tanah masyarakat	Tumpang-tindih izin usaha ini juga mengancam eksistensi masyarakat adat Kaltim karena sebagian izin merambah kawasan permukiman suku adat Dayak
		7) Pembuatan Surat PPAT tanpa peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh Tim yang terkait dan yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat. (Kasus Kelurahan Timbau dan Rapak Mahang 8) PPAT dibuat pada lahan yang ada pemilik secara sah;	Terjadi complain antara pemilik tanah dan pembeli yang disebabkan oleh oknum tersebut.
B	Sara (Suku, Agama, Ras & antar Golongan)		
B.1	Aspek Suku, Ras	1) Terdapat cara pandang yang berbeda seseorang/ kelompok/ komunitas terhadap adat istiadat budaya orang lain misalnya adanya adat Kuwangkai suku dayak di desa Jahab yang merupakan upacara adat berupa arena judi namun bertentangan dengan agama dan peraturan perundangan	Dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat muslim di sekitar arena perjudian
		2) Di beberapa tempat ada pemaksaan perubahan budaya warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warga etnis tertentu yang mau bekerja harus melalui forum/omas/ kelompok tertentu terlebih dahulu.
		3) Telah terjadi penggunaan IPTEK sehingga terjadi perubahan dratis pada mata pencaharian pada tatanan ekonomi dan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan satelit dalam pencaharian ikan oleh nelayan
		4) Adanya Ormas /OKP/ organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjamunya ormas2 ke daerah

		lainnya yang memiliki paham radikal dan kekerasan	yang cenderung menjadi komplik ketika ormas menjadi alat oleh perusahaan/warga dalam penyelesaian masalah. ▪ Tapi masih dalam batas kewajaran
		5) Terdapat ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu terutama pada wilayah yang ada perusahaan tambang dan sawit	▪ Masyarakat di sekitar perusahaan sering menuntut untuk diterima kerja di perusahaan tersebut, karena perusahaan selalu menerima pekerja dari luar wilayah sehingga menimbulkan kecemburuan social.
		6) Terdapat propokasi dan propokator lokal, daerah dan pusat pada wilayah komplik yang melibatkan ormas	▪ Sering kali terjadi propokasi oleh oknum/ormas yang mempunyai kepentingan seperti sengketa lahan.
		7) Adanya tumpang tindih lahan antar warga, antar warga dengan pihak perusahaan, antar perusahaan seperti kasus di Kecamatan Muara Kaman, Muara. Badak, Kembang Janggut, dan Tenggarong.	▪ Banyak kasus tumpang tindih lahan yang ditumpangi oleh ormas.
		8) Terdapat peredaran miras dan narkoba di kalangan masyarakat hampir di semua Kecamatan Kukar. Berdasarkan informasi banyak toko-toko yang menjual miras telah memiliki ijin penjualan dari Pemda setempat.	▪ Masalah yang selalu terjadi akibat dari miras dan narkoba adalah masalah keributan, perkelahian dll. ▪ Di sekitar lokasi perusahaan banyak juga dijual miras.
		9) Terdapat etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya misalnya di Muara Badak, Anggana dan Samboja. Adanya kecenderungan ormas Dayak sering mengklaim penguasaan lahan dengan mengatasnamakan hak ulayat.	▪ Terjadi pertentangan kepemilikan lahan yang melibatkan massa dari kedua belah pihak yang bersengketa. ▪ Adanya provokator local yang menghasut warga dan menimbulkan konflik social
		10) Ada intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hak ulayat/adat etnis tertentu. Pemerintah dalam mengeluarkan ijin usaha tidak memperhatikan lokasi usaha tersebut apakah ada hak ulayat masyarakat di dalamnya	▪ Masyarakat yang merasa berhak atas tanah tersebut akan memperjuangkan hak mereka, dimana perjuangan ini akan berujung dengan masalah konflik social.
2	Aspek Agama	1) Di Tenggarong di Desa Jahab ditemukan adanya agama baru (para penganut ini tidak ingin disebut aliran, tapi agama). Meski Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifudin sudah mengakui Agama Baha'i sebagai agama di Indonesia, namun Kemenag Kutai Kartanegara (Kukar) belum bisa mengambil sikap. Pasalnya, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur soal agama Baha'i tersebut	▪ Berkas ttg agama Baha'i sudah diserahkan ke Kejaksaan Kukar.
		2) Adanya paham ideology yang disebut Khilafatul Muslimin di Desa Jahab Kec. Tenggarong. Organisasi <i>Khilafatul Muslimin</i> yang baru saja menyebar di KM 7, Kelurahan	▪ Paham ini menganggap ormas Islam yang ada di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) adalah

		Jahab, Tenggarong dinilai ilegal. Sebagai organisasi, Khilafatul Muslimin belum mengantongi legalitas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) (Kukar). Aliran ini	aliran yang salah Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Kutai
		3) Adanya cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok/ komunitas/ negara tertentu terhadap nilai agama	Munculnya komunitas Islam radikal yang merupakan permasalahan internasional/negara
C Batas Wilayah			
		1) Adanya batas wilayah yang melanggar daerah lain seperti : Kota Samarinda dan Kab. Kukar 1. Kecamatan Loa Janan – Samarinda (Desa Tani Bakti dan Desa Batuah) 2. (Kec.Air Putih, Kec. Sungai Kunjang dan Kec. Tenggarong Sebrang, Desa Pinang dan Gn, Kapur 3. Samboja dan Balikpapan (Kel. Salok Api Darat, Kel. Gunung Tembak, Kec. Balikpapan Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi selalu ada, berkaitan dengan pertanahan menjadikan kesulitan dalam hal permohonan hak atas tanah. ▪ Justru berdasarkan perbedaan persepsi inilah sering terjadi klaim akan batas wilayah Kabupaten/Kota dan antar desa/Kelurahan ▪ Pemmasalahan batas wilayah antara kab. Kukar dengan Kota Samarinda Desa Tani Bakti Loa Janan dengan Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
		2) Adanya perbedaan pendapat/persepsi tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah berkaitan batas wilayah. Perbatasan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara; Samarinda – Kukar	Secara umum disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan unsure asset, daya alam, pendapatan desa/kelurahan dan 58nsure kedekatan dengan kota besar..
		3) Ada indikasi potensi konflik antar warga berkaitan dengan batas wilayah seperti Kukar – Samarinda dan Kukar – Bontang. Perubahan wilayah akibat penggabungan dan pemekaran yang tidak diperjelas pemasangan tanda batas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kemungkinan konflik antar warga terutama apabila lahan memiliki nilai ekonomi dan dipropokasi oleh pihak ketiga.
		4) Ada tumpang tindih lahan antar warga, antar warga dengan perusahaan untuk perusahaan seperti di Desa Muara Kaman dan Kecamatan Muara Kaman, dimana area kawasan yang diperuntukkan warga transmigrasi yang dipinjam pakaikan perusahaan untuk kebun sawit oleh perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentan terhadap pengerahan massa untuk kepentingan pihak tertentu.
D. Sumber Daya Alam (SDA)			
		1) Adanya konflik antara pemerintah dengan rakyat, antara lain bersumber dari eksploitasi SDA atau invertensi kebijakan/regulasi terutama di wilayah Kecamatan yang memiliki tambang	Konflik akibat kebijakan pemerintah terhadap lahan masyarakat
		2) Ada kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi tambang dan lahan warga dengan banyaknya Ijin Usaha	Masyarakat merasa dirugikan karena lahan pertanian sudah terkepung perusahaan pengeruk batu bara yang

		Pertambangan di Kukar	menyebabkan turunnya hasil panen
		3) Adanya kesenjangan sosial sosial dan ekonomi antara warga lokal dengan pendatang dalam penguasaan SDA seperti di Kelurahan Loa Ipuh Darat Tenggaraong, warga pendatang lebih banyak diterima bekerja dibandingkan warga lokal;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecemburuan social ▪ Rasa social yang kurang pada pekerja pendatang pada masyarakat setempat.
		4) Ada angkutan perusahaan yang menggunakan lahan warga setempat misalnya jalan poros Loa Kulu – Loa Janan yang menyebabkan debu yang sangat meningkat dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat.	Dikhawatirkan akan terjadi pengerahan massa dengan menutup jalan bagi angkutan perusahaan apabila tidak ada tindakan dari perusahaan untuk mengurangi debu-debu tersebut.
		5) Perusahaan Tambang di Loa Ipuh Darat Tenggaraong memberikan dampak kerusakan pada rumah warga, pencemaran air, serta banjir pada musim hujan yang terjadi akibat rusaknya tanggul penampungan air limbah dari bekas kegiatan pertambangan, hal ini menyebabkan banyak lahan pertanian warga yang rusak dan gagal panen.	Masyarakat merasa dirugikan dan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan tersebut
		6) Di Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang. Hilir mudik kendaraan roda besar dan alat berat melintas di jalan umum yang menyebabkan kerusakan jalan dan debu yang beterbangan.	Pernah terjadi pengerahan massa dengan menutup jalan untuk angkutan perusahaan.
E.	Geografis (potensi rawan bencana alam)		
E.1	Banjir	Pemah terjadi banjir besar di Tenggaraong (kel. Loa Ipuh - Kel. Mahulu dan Kel. Jahab) (Jan 2014), Desa Kota Bangun seberang Kec. Kota Bangun, Desa Kedang Murung Desa Pela Kec. Kota Bangun Desa Semayang di Kec Kenohan dan Dusun Sebuntal Kec. Marang Kayu (mei 2014) yang disebabkan air pasang Sungai Mahakam yang meluap.	
E.2.	Tanah Longsor	1) Kejadian Tanah longsor di - Desa Teluk Dalam Kec. Tenggaraong Sebrang (Maret 2014) dan Sebulu dan Loa Janan menyebabkan 1 mes karyawan dan 1 unit excavator tenggelam di sungai Mahakam	
		2) Kel Sanga-sanga Muara dan Kel Sarijaya di kecamatan Sanga-sanga (Feb 2014) menyebabkan 1 kendaraan roda 4 tenggelam	
		3) Gunung Sentul Tenggaraong (15 Mei	

		2014)	
		4) Kel. Jahab di Kecamatan Tenggarong	
		5) Sebuntal Kecamatan Marang Kayu (April 2014) dimana lokasi longsor persis berada di jalan perhubung antar desa	
E.3.	Kebakaran dan kekeringan	1) Kebakaran Hutan terjadi - Desa Sei. Mariam Kec. Anggana (12 Maret 2014)	Rawan kebakaran karena kegiatan masyarakat untuk lahan ladang pertanian
		2) Loa Janan, Samboja	Darurat bencana asap
		3) Desa Sebuntal Kec. Merang Kayu (12 Maret dan 18 2014)	
		4) Muara Jawa dimana luas lahan yang terbakar 2 Ha	
		5) Muara Kaman, Sebulu, dan Samboja	
		6) 112 titik api di kukar yang terdeteksi oleh UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL)	
		7) Kekeringan pernah terjadi di Kota Bangun	
E.4	Angin Putting Beliung	1) Angin Putting Beliung terjadi di Samboja Kuala (Januari 2014)	
		2) Desa Bukit Pariaman dan Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Sebrang (Feb 2014).	Merusakkan rumah penduduk sekolah dan keramba ikan
		3) Dusun Sebuntal Kec. Marang Kayu (mei 2014)	menyebabkan 1 orang meninggal

3. Kecamatan Balikpapan Barat

No.	Aspek Konflik	Permasalahan	Potensi konflik
A	Aspek Politik Sosial dan Budaya		
A.1.	Politik	1) Terdapat adanya tumpang tindih lahan antar warga atau warga dengan perusahaan, umumnya terjadi di kawasan industri atau kawasan baru terbangun, seperti lahan KIK di Kariangau berbatasan dengan Karang Joang. Tumpang tindih lahan saling mengklaim kepemilikan rentan terhadap ancaman potensi konflik.	Terjadinya klaim atau tuntutan kepemilikan lahan dari pihak perusahaan, pihak lainnya melakukan perlawanan dengan memanfaatkan ormas atau OKP tertentu. ▪ Salah satu pihak melakukan perlawanan karena kalah dalam proses hukum di pengadilan dengan melibatkan massa.
		2) Adanya monopoli dari etnis tertentu terhadap hajat hidup masyarakat banyak seperti di pelabuhan kapal, lahan parkir, sertifikat tanah di pantai-pantai dan lainnya.	▪ terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial, dimasyarakat, menuntut keadilan terhadap hajat hidup masyarakat banyak..
A.2.	Aspek Sosial dan Budaya	1) Terdapat adanya tumpang tindih lahan antar warga atau warga dengan perusahaan, umumnya terjadi di kawasan industri atau kawasan baru	▪ erjadinya klaim atau tuntutan kepemilikan lahan dari pihak perusahaan, pihak lainnya melakukan perlawanan dengan memanfaatkan

		terbangun, seperti lahan KIK di Kariangau berbatasan dengan Karang Joang. Tumpang tindih lahan saling mengklaim kepemilikan rentan terhadap ancaman potensi konflik.	ormas atau OKP tertentu. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Salah satu pihak melakukan perlawanan karena kalah dalam proses hukum di pengadilan dengan melibatkan massa.
		2) Adanya monopoli dari etnis tertentu terhadap hajat hidup masyarakat banyak seperti di pelabuhan kapal, lahan parkir, sertifikat tanah di pantai-pantai dan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial, dimasyarakat, menuntut keadilan terhadap hajat hidup masyarakat banyak..
		3) Salah satu penyakit sosial yang sangat rawan di Kecamatan Barat terutama di daerah pinggiran masih terdapat peredaran minuman keras (miras) dan rajikan berasal dari kapal-kapal di pelabuhan, miras illegal oleh kios-kios, pedagang-pedagang ilegal di Kelurahan Baru Tengah, Baru Ulu, baru ilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mudahnya mendapatkan miras di kalangan generasi muda , pada saat mabuk terjadi perkelahian antar pemuda, yang terkadang membawa nama etnis atau suku tertentu. ▪ Beredarnya minuman keras digenerasi muda khususnya menjadi salah satu pemicu perkelahian dan beberapa tindak kejahatan di wilayah Kota Balikpapan.
B	Sara (Suku, Agama, Ras & antar Golongan)		
		1) Adanya etnis tertentu dari luar Kalimantan mengklaim/ mengakui beberapa tanah pantai dan empang menjadi miliknya pada hal baru saja tinggal di Kecamatan Balikpapan Barat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat local dan pendatang. Sentemen antar etnis.
		2) Adanya seseorang atau sekelompok orang dari etnis tertentu, kurang menghargai masyarakat lokal, terlihat dari sikap maupun tindakannya. Kecendrungan merendahkan harga diri orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan tuntutan atau perlawanan jika harga diri dan kehormatan orang lain tidak dihargai. ▪
C	Batas Wilayah		
		Adanya perbedaan pendapat atau persepsi tentang batas wilayah antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kelurahan Kariangau sungai kenaitas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk rasa massa kedua belah pihak melihatkan warga sekitar batas wilayah tersebut, saling mengklaim batas wilayah masing-masing.
D.	Geografis (potensi rawan bencana alam)		
D.1	Banjir	Lokasi rawan Banjir di Kecamatan Balikpapan Barat seperti di Kelurahan Baru Ilir dan Margasari.	
D.2.	Tanah Longsor	Lokasi Tanah longsor : Kelurahan Baru Ulu, dan baru tengah	
		Lokasi rawan tanah longsor di Gunung Rambutan Kelurahan Karang Rejo. Kelurahan Sumber Rejo, di Bukit	

		Samirahan, Gunung Guntur. Di Kel Telaga Sari perbatasan Unocal kel Prapatan.	
D.3.	Kebakaran dan kekeringan	Lokasi rawan kebakaran di Kecamatan Balikpapan Barat, antara lain di Kelurahan Baru Tengah, Baru Ilir, Baru Ulu, Margasari dan MargoMulyo. Didaerah permukiman padat penduduk.	
D.4	Angin Puting Beliung	Lokasi rawan angin puting beliung terutama di kawasan pinggir pantai di Kelurahan Baru Ulu, Baru Ilir dan Margasari.	
E.	Batas Wilayah		
		Adanya perbedaan pendapat atau persepsi tentang batas wilayah antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kelurahan Kariangau sungai kenaitas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk rasa massa kedua belah pihak melitahkan warga sekitar batas wilayah tersebut, saling mengklaim batas wilayah masing-masing.

4. Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

No.	Aspek Konflik	Permasalahan	Potensi konflik
A Aspek Politik Sosial dan Budaya			
A.1.	Politik	1) Adapotensi konflik akibat PILKADA yang akan datang.	Mobilisasi massa partai pengusung hanya berlangsung ketika jadwal masa kampanye.
		2) Ada indikasi perebutan kekuasaan antar elit politik, yang melibatkan massa banyak.	Adanya pembelaan terhadap warga oleh caleg tertentu karena lahan yang ditempati secara turun temurun oleh warga akan diambil BUMN.
		3) Ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. (misalnya :kebijakan tumpang tindih lahan, hak tanah ulayat dll).	Kebijakan tumpang tindih lahan penyelesaiannya diserahkan kepada pejabat lebih tinggi.
A.2.	Aspek Sosial dan Budaya	1) Terdapat cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok/komunitas terhadap adat istiadat, budaya orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> Warga protes. Pernah diingatkan oleh warga dalam lingkungan RT itu sendiri, agar tidak melakukan hal-hal diluar adat budaya setempat.
		2) Menyemayamkan jenazah dirumah duka selama 2 (dua) hari.	<ul style="list-style-type: none"> Ketua RT VII memperingatkan agar berhati-hati akan ada tindakan berikutnya (diluar tanggungjawab) Ketua RT. Pernah ada penyerangan dari luar dengan maksud agar menghentikan kegiatan ibadah, karena melewati jam malam.
		3) Terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang. Contoh : Pendataan warga miskin :	Lapangan kerja yang ditekuni tidak sesuai profesi/tidak sesuai bakat (warga tidak ada pilihan lain).
		4) Petugas data BPS kurang cermat menginventarisasi rumah warga miskin. Rumah ditinggal/sedang pergi keluar/terkonci hanya dilewatkan, tidak kembali diulang. 5) Sosialisasi lebih intensif kepada warga penerima raskin maupun bantuan modal UKM pemerintah. Contoh : PKL : 6) Para pendatang banyak menjadi PKL, kurang mematuhi aturan Pemerintah. Misal : PKL menggunakan trotoar dan jalan umum.	<ul style="list-style-type: none"> Penerima raskin tidak merata terjadi di Kel. Karang Anyar, Kel. Karang Asam Ilir dan Kel. Loa Buah. Warga pendatang lebih bersifat atraktif, sementara pedagang lokal berkeinginan tidak melanggar aturan/konvensi.
		7) Tidak signifikan kesenjangan pendidikan antara masyarakat lokal dan pendatang	<ul style="list-style-type: none"> Job tenaga lokal disektor pertambangan tidak sesuai dengan penempatan dibidang keahliannya. Pekerja tambang banyak diisi tenaga pendatang dibanding

			tenaga lokal.
		8) Ada Ormas, OKP atau Organisasi lain yang mempunyai paham agak radikal dan kekerasan, menjadi backing ketika warga menghadapi masalah. Contoh : 9) Ketika membackingi tuntutan warga yang mendiami lahan BUMN secara turun temurun. Warga meminta agar lahan dijual kepada warga yang sudah lama menempati.	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Ormas, OKP beraksi membela warga ketika lahan warga yang ditempati secara turun temurun akan diambil alih oleh BUMN.
		10) Mendukung pembangunan Gereja (Toraja) di RT 11 Kel. Loa Buah, karena mendapat penolakan dari warga setempat	<ul style="list-style-type: none"> • OKP tertentu mendukung kelanjutan pembangunan gereja di RT 11 Kel. Loa Buah, karena diperoleh informasi ada sejumlah warga akan melakukan pembongkaran atas bangunan itu
		11) Ada masyarakat lokal termarginalisasi peluang ekonomi dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kesempatan menerima bantuan modal pemerintah. • Warga hidup dengan tenaga yang ada (unskill). Menjadi buruh di pabrik kayu. • Upah buruh pabrik dibanding upah kerja di tambang cukup ada perbedaan.
		12) Adanya terdapat ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu. 13) Contoh Warga pendatang mendominasi pekerjaan di sektor pertambangan utamanya di mekanik otomotif.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ketersinggungan penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga pendatang, karena pekerja dilapangan warga pendatang (skill).
		14) Apakah terdapat provokasi dan provokator lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Provokator asal OKP tertentu menyuarakan pembelaan untuk kepentingan agama.
		15) Ada tumpang tindih lahan antar warga di Kelurahan Loa Buah.	<ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih kepemilikan lahan antara penduduk lokal yang membuka hutan lebih awal, kini dikuasai etnis pendatang.
		16) Terdapat peredaran minuman keras (Miras) di kalangan masyarakat di Kelurahan Loa Bakung.	<ul style="list-style-type: none"> • Para peminum (generasi muda) yang mengganggu warga, dan berpotensi membuat kegaduhan, langsung dilaporkan kepihak kepolisian setempat.
B	Sara (Suku, Agama, Ras & antar Golongan)		
	Aspek Keetnisan/Suku	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya dengan 	Melakukan pembelian/penguasaan lahan

		pembuktian/dinyatakan dengan perkataan dan perwujudan.	yang cukup luas dari kalangan mampu dari salah satu etnis tertentu. Lokasi salah satu desa di Loa Buah.
	Aspek Agama	1) Pembangunan rumah ibadah agama tertentu ditentang/ditolak warga RT 11 (Kel. Loa Buah), karena jumlah pemeluk agama tertentu hanya 30 KK, sementara 50 KK lainnya warga muslim. Proses pembangunan tetap saja terus berlanjut sampai sekarang.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghadangan warga Kelurahan Loa Buah terhadap Walikota Samarinda yang hendak melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja. Walikota membatalkan diri atas kejadian itu.
		2) Jumlah rumah ibadah di RT 11 ada 3 rumah ibadah : GPdI; Gereja Toraja dan Gereja Timor, jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Protes warga ke Pemkot Samarinda dilakukan sesuai prosedur, namun tidak mendapat tanggapan dari Walikota Samarinda. • Protes warga setiap tahun, sejak 2009 sampai sekarang tidak ada tanggapan dari pihak berwenang (Walikota Samarinda dan Badan Kesbangpol Samarinda)
		3) Ada pelecehan agama baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan.	Dari salah satu etnis tertentu dan beda agama mengatakan : ketika tidur nyenyak (waktu subuh) diganggu suara dari Masjid/Langgar.
		4) Rumah tinggal dijadikan rutin ibadah. Jemaat banyak dari jauh/luar. Waktu ibadah bersamaan ibadah kaum muslimin. Ibadah sampai larut malam (bukan malam minggu/libur). Bernyanyi diiringi gitar. Warga setempat resah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pernah ada protes warga lokal dengan melakukan penyerangan dari luar RT VII, Kel. Loa Buah, bertujuan memperingatkan kepada etnis tertentu agar menghentikan aksi ibadahnya.
		5) Ada cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok/negara tertentu terhadap nilai agama. Contoh :Yayasan Min Haji Sunnah Jakarta – (Salafi di Timur Tengah) - konservatif, : Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan sejenisnya adalah perbuatan Bid'ah Kehadiran Habib Riziq Syihab Ketua FPI Pusat, mendapat penentangan dari etnis dan agama tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus Islamic Center mendapat surat dari MUI Kaltim, ketika Yayasan Min Haji Sunnah menggunakan IC sebagai kegiatan syiar Islam yang belum mendapat rekomendasi Kemenag RI. • Setiap komunitas Islam yang menggunakan IC harus dilakukan selektif. • Kelompok etnis dan agama tertentu mempertanyakan via SMS ke Pengurus IC atas kehadiran dan contents dakwah Habib Riziq Syihab di Islamic Center Samarinda, tanggal 27 Agustus 2014.

C Batas Wilayah			
		1) Ada batas wilayah yang melanggar daerah lain (mencaplok) daerah lain. Wilayah Samarinda dikuasai Pemkab Kutai Kartanegara. RT 18 (Kel. Loa Buah); Pal Besi RT 52 (Kel. Beringin Raya) dan RT 21 (Kel. Lok Bahu) memiliki deposit batubara cukup besar, dikelola oleh PT. Multi Harapan Utama (MHU) dan PT. Bukit Baiduri Enterprise (BBE).	<ul style="list-style-type: none"> • Tiga RT yakni : RT 18 (Kel. Loa Buah); RT 52 (Kel. Beringin Raya) dan RT 21 (Kel. Lok Bahu). Warga tiga RT tsb. mendatangi aparaturnya desa wilayah Kukar untuk mengurus administrasi kependudukan.
		2) Ada perbedaan pendapat/personal tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah berkaitan batas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Warga bersikukuh memilih administrasi kependudukan di wilayah Kukar, padahal menurut Perda Provinsi menetapkan tiga wilayah itu merupakan wilayah Samarinda
D. Sumber Daya Alam (SDA)			
		1) Pernah adanya konflik antara pemerintah dengan rakyat, antara lain bersumber dari eksploitasi sumber daya alam atau intervensi kebijakan/regulasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait tiga RT memilih administrasi kependudukan ke Pemkab Kukar, maka di daerah ini dianggap status quo oleh Kel. Loa Buah.
		2) Ada kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dgn lokasi tambang dgn lahan warga.	<ul style="list-style-type: none"> • Masalahnya ditangani/diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kaltim.
		3) Ada terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga lokal dengan pendatang dalam penguasaan sumber daya alam.	
		4) Para pendatang memiliki modal besar sehingga mampu menggarap sumberdaya alam disini. Warga lokal sebatas sebagai pekerja (unskill).	
E. Geografis (potensi rawan bencana alam)			
D.1	Banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada Banjir di Desa Karang Mulya dan Desa Bendang Kelurahan Lok Bahu, banjir akibat pemotongan bukit dan tidak tersedianya drainase yang memadai. 2) Banjir di 6 RT Kelurahan Loa Buah 3) Penyebabnya, sejak ada jembatan Mahulu (jalan pendekat ke jembatan cukup tinggi dari peil jalan raya). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit dilewati warga ketika hujan lebat. • Sudah beberapa kali menyampaikan usulan ke Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda. • Bulan Juli 2014 sudah dilakukan survey pemetaan pengendalian banjir Kelurahan Loa Buah oleh Tim dari Pemprov Kaltim.

5. Kabupaten Kutai Timur

No.	Aspek Konflik	Permasalahan	Potensi konflik
A	Aspek Politik Sosial dan Budaya		
		1) Terdapat adanya potensi konflik akibat Pilkada/ Pilbup di Kutai Timur yang akan datang, hal ini disebabkan antara lain terjadinya perbedaan persepsi dan kepentingan team sukses calon tertentu, perbedaan partai, kepentingan pemain-pemain lama untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, tidak siap kalah oleh calon tertentu, tidak puas dengan hasil perhitungan suara, indikasi konflik di Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan dan Sangkuirang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk rasa melibatkan tim sukses calon yang tidak siap kalah dan Pilkada ▪ Penolakan atau serangan balik terhadap kampanye hotam dengan fitnah yang dilakukan oleh calon tertentu, baik langsung maupun di media massa. ▪ Penolakan oleh team sukses terhadap DPT atau perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, jika terdapat indikasi kecurangan oleh pihak yang kalah. ▪ Tuntutan ke jalur hukum/ mahkamah konstitusi bagi calon Pilbup yang kalah. ▪ Telah terjadi pemecatan terhadap komisioner KPU yang kedapatan politik uang
		2) Terdapat adanya indikasi persaingan perebutan kekuasaan antar elit politik, yang melibatkan massa, Persaingan elit politik sesama etnis lokal untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Baik pejabat birokrasi maupun pimpinan partai politik di kabupaten Kutai Timur, mengingat Bupati saat ini sudah dua periode menduduki jabatan dan tidak akan bertarung lagi Pilbup yang akan datang pada tahun 2016.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk rasa massa pendukung elit tertentu mendapat tantangan kelompok elit lainnya, baik sesama etnis maupun berbeda etnis. ▪ Pendukung elit tertentu melakukan pressure sentement etnis atau primordialisme untuk kepentingan kelompok tertentu. ▪ Telah ada nama muncul calon bupati / wakil upati : Awang Ferdian Hidayat , Mugni ,Ismunandar, Edward , dan lain-lain yang telah terekspose di media masa.
		3) Terdapat kesenjangan pembangunan infrastruktur antar kecamatan maupun kampung di Kabupaten Kutai Timur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah yg merasa daerahnya tidak diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur khususnya.
		4) Kesenjangan pembangunan antar daerah perkotaan, pesisir dan pedalaman. sebagian besar alokasi dana pembangunan diperkotaan. Aspek lainnya adalah kampung yang kalah dalam Pilkada dan tidak mendukung bupati terpilih.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikasi kebencian sekelompok warga kepada pemerintah daerah adanya ketidakadilan dalam alokasi dana pembangunan. ▪ Gejala konflik tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan. Di daerah Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Kobun dan wilayah lain.Selain kesenjangan pembangunan infrastruktur, tetapi juga belum

			dibangunnya jalan tembus di Sangkulirang Muara Wahau, Telen, Muaraa Wahau dan Lairang.
		5) Adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat. Terutama didaerah yang punya potensi ekonomi tinggi, kaya tambang, hutan dan perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuntutan ganti rugi lahan warga atas nama adat mendapat perlawanan dari pihak perusahaan dengan dukungan ormas tertentu dan aparat lainnya.
		6) Proses ganti rugi lahan warga untuk kepentingan perusahaan tidak transparan, terjadi Sangatta Selatan (TNK), Sangatta Utara (Pertamina) dan daerah pedalaman seperti Muarancalong, Kongbeng, Telen, Koubun dan Sandaran.	Kekecewaan masyarakat terhadap sosialisasi ganti rugi lahan hanya tingkat pejabat kecamatan.
		7) Terdapat cara pandang yang berbeda seseorang/ kelompok/ komunitas/ terhadap adat istiadat, budaya orang lain karena di Kutai Timur terdapat banyak suku seperti Bugis, Jawa, Toraja, Flores, Toraja dan Batak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kalau pemerintah menjaga terus menerus kerukunan antar mereka akan terjadi konflik
		8) Terdapat adanya perubahan budaya, adat atau kebiasaan warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja etnis lainnya. Pertentangan nilai-nilai tradisional/ kearifan lokal dengan nilai-nilai modern (westernisasi), Hal ini terjadi di kampung atau kecamatan dimana ada perusahaan tambang/ perkebunan, seperti di Kecamatan Koubun, Sangkulirang, Telen, Bengalon, Muara Wahau, Muarancalong, Kongbeng dan kecamatan lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya perubahan dan pertentangan nilai-nilai, adat istiadat, kebiasaan kelompok masyarakat lokal dengan pihak perusahaan yang berbeda etnis dan agama. ▪ Terjadinya konflik nilai-nilai tradisional/ kearifan lokal dengan nilai-nilai modern atau westernisasi, khususnya generasi tua dan remaja.
		9) Terdapat ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang. seperti di areal perkebunan, tambang batubara dan birokrasi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketidakberdayaan , kalah beraing , pelebelan rendah dan teknanan oleh pemerintah / pendatang /perusahaan pada penduduk lokal
		10) Terdapat kesenjangan pendidikan antara masyarakat lokal dan pendatang, hal ini terlihat pada perusahaan pertambangan, pekerja pendatang lebih unggul dalam aspek pendidikan dan jabatan, sedangkan masyarakat lokal kebanyakan unskill labour .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuntutan keadilan jabatan dan pendapatan oleh pekerja lokal melibatkan warga setempat. ▪ Isu-isu primodialisme yang dihembuskan oleh oknum tertentu terhadap pekerja lokal.
		11) Terdapat adanya Omas, OKP etnis tertentu mengarah ke paham kerasdi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Munculnya Omas, OKP dari etnis lain untuk penyeimbang atau

		Kutai Timur. Beratribut militerisme dan mempertahankan adat lokal, seperti lasykar, komando dan gerakan.	tandingan melibatkan pemuda atau warga. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ormas, OKP dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu konflik dgn masyarakat atau sebaliknya.
		12) Adanya ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu, khususnya masyarakat lokal terhadap orang Bugis, Batak, Toraja, China dan Jawa diperusahaan pertambangan dan perkebunan sawit di perusahaan Koubun, Telen, Muara Wahau, Bengalon, Sangkulirang dan lain-lain tempat dimana Kutai Timur memiliki kebun sawit yang luas. Sebaliknya adanya diskriminasi penerimaan PNS dan penempatan jabatan penting di Pemkab Kutai Timur antara orang lokal lebih mayoritas dibanding pendatang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada ketersinggungan masyarakat lokal terhadap orang pendatang yang bekerja di perusahaan baik tambang maupun perkebunan. ▪ Munculnya barisan sakit hati, like and disk like di birokrasi, dan saling melaporkan ke pihak berwajib jika ada indikasi kesalahan.
		13) Adanya kepentingan kelompok, berkedok ormas. OKP, terjadi didaerah pertambangan dan perkebunan. Juga upaya perlindungan kera dan kijang serta hewan yang lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provokator memprovokasi warga/propaganda melibatkan warga dengan alasan untuk membela lingkungan, kesejahteraan rakyat dan melindungi hayati dan hewani langka.
		14) Adanya klaim warga masyarakat terhadap lahan pertambangan dan perkebunan terjadi di Kecamatan yang ada di Kutai Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya klaim / tuntutan warga mendapat perlawanan dari pihak perusahaan didukung oleh Ormas atau OKP tertentu.
		15) Terjadi sengketa lahan di darah transmigrasi dari Wonogiri di Kaliorang terminal pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan terjadinya konflik horizontal antara warga transmigrasi dengan masyarakat lokal atas nama adat.
		16) Kenyamukan Sangatta Selatan ,areal hulu minyak dan gas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan pelabuhan yang rentan terhadap konflik
		17) Terdapat peredaran minuman keras (Miras) di kalangan masyarakat, khususnya di tempat hiburan malam dan lokalisasi .Penjualan miras dilakukan secara diam-diam di warung-warung pinggir jalan, kios dan lainnya di sekitar terminal bis , sepanjang Bontang- Sangatta dan lainnya. Umumnya para pegawai dari perusahaan sawit dan batubara yang sering menjadilanggan minum di tempat hiburan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beredanya minuman keras dikalangan generasi muda khususnya salah satu pemicu perkelahian antar remaja, yang terkadang membawa-bawa nama etnis.
B	Sara (Suku, Agama, Ras & antar Golongan)		
		1) Adanya etnis tertentu ingin menguasai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadi pertentangan kepemilikan

		wilayah etnis lainnya, misalnya terjadi klaim warga lokal atas nama tanah adat/ nenek moyang diwilayah dengan Pertamina dan TNK	lahan melibatkan massa banyak kedua belah pihak. yang bersengketa. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aksi provokator lokal menghasut warga dan menimbulkan konflik sosial
		2) Adanya pelanggaran hak dan kewajiban lintas etnis yang tidak dipenuhi. Misalnya denda adat belum dipenuhi oleh etnis tertentu karena denda adat sangat mahal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menimbulkan kekecewaan etnis tertentu terhadap etnis lain, merasa adatnya dilecehkan orang lain. ▪ Penolakan adat tertentu oleh kelompok lain berbeda etnis.
		3) Adanya intervensi pihak pemerintah atau pengusaha atas hak adat etnis tertentu. Hal ini terjadi disebabkan oleh perbedaan persepsi dan pendapat antara pemerintah (menggunakan Undang-Undang dengan masyarakat menggunakan hukum adat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk rasa melibatkan massa banyak menentang kebijakan pemerintah atau perusahaan.
		4) Terdapat indikasi pelecehan agama, baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjadinya konflik langsung antar penganut/ pengikut agama yang sama tetapi berbeda aliran kepercayaan.
		5) Adanya aliran sesat/menyimpang dari kelompok pendatang yang tidak jelas yang ada di Jl.Guru besar .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerangan dan pengrusakkan tempat ibadah oleh warga terhadap pengikut yang dianggap menyimpang. ▪ Penyebaran aliran sesat secara terbuka kepada masyarakat umum.
C Batas Wilayah			
		1) Adanya batas wilayah yang melanggar daerah lain, terjadi perebutan tapal batas didaerah tambang, lokasi perkebunan, permukiman dan pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unjuk rasa warga masyarakat terhadap perusahaan tambang atau perkebunan. ▪ Tuntutan masyarakat atau tuntutan pihak perusahaan melibatkan massa.
		2) Terdapat perbedaan pendapat atau persepsi tentang batas wilayah antara masyarakat dan pemerintah. Contoh pemerintah telah menetapkan batas wilayah TNK, PT KPC dan perusahaan Kelapa sawit sesuai peraturan, masyarakat lokal tidak mengizinkan lahan tersebut untuk ditambang dan dijadikan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuntutan warga lokal terhadap pihak perusahaan berkaitan batas wilayah. ▪ Terjadinya konflik terbuka antar warga maupun warga dengan pihak perusahaan.
D. Sumber Daya Alam (SDA)			
		1) Ada perbedaan persepsi antara perusahaan dengan warga, berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam di Kutai Timur yang disebabkan oleh akibat kegiatan tambang terjadinya pencemaran air, debu dan sampah di Kecamatan Sangatta Utara, Selatan, Sangkulirang, Bangalon, dan Muara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuntutan warga terhadap pihak perusahaan berupa dana kompensasi atau lainnya. ▪ Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik antara pemerintah perusahaan , LSM dan warga yaitu adanya lubang

		Wahau	bekas tambang yang belum direklamasi sesuai kepatutan
		2) Adanya angkutan perusahaan tambang maupun perkebunan sebagian menggunakan lahan warga setempat di semua jalan di Kutai Timur yang tonasenya melebihi .	.Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik adanya kebijakan pertambangan dari pemerintah daerah berkaitan dengan lokasi tambang dengan lahan warga, misalnya menggunakan lahan warga untuk jalur lintas pertambangan dan perkebunan
		3) Akibat dari eksploitasi kegiatan perusahaan, mengakibatkan pencemaran, debu,sampah hal ini terjadi hampir semua kegiatan di wilayah tambang terutama di Jl.Jend.Sudirman dan jalan-jalan kota kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan konflik terjadi permintaan kompensasi kesehatan, kebersihan, keselamatan lalu lintas dan jiwa ▪ Kemungkinan konflik terjadi minta asuransi ke perusahaan dengan memaksakan kehendak. ▪ Kemungkinan konflik terjadi penutupan jalan secara paksa ▪ Kemungkinan konflik terjadi penutupan perusahaan secara sepihak
		4) Pemusnahan seni budaya daerah Dayak dan Kutai karena wilayahnya dicaplok oleh perusahaan batubara dan kelapa sawit misalnya di Muarancalong, Sangkulirang, Miu Baru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan konflik terjadi penyegelan pabrik oleh massa ▪ Konflik terjadi karena penduduk asli akan menentang pendirian pabrik , pembukaan lahan dan operasional
		5) Akibat dari tumpahan minyak oleh PT.Pertamina di areal pengeboran yang menggenangi daerah sekitarnya di area hulu minyak di sekitar Sangatta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tambang/perkebunan akan diganggu oleh penduduk asli
		6) Hutan gundul karena penebangan liar dan wilayahnya dicaplok oleh perusahaan batubara dan kelapa sawit misalnya di Muara Ancalong, Sangkulirang, Miu .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik akibat Potensi konflik adalah pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerugian karena tanam tumbuh mati , pencemaran dapat memicu pengusiran perusahaan oleh warga setempat. ▪ Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik dengan pengerahan massa baik tokoh masyarakat adat maupun LSM akibat pemusnahan hutan bakau, hutan rotan, hutan ulin, hutan gaharu, hutan bengkirai dan habitat lainnya
E. Geografis (potensi rawan bencana alam)			
		1) Penyebab Banjir di Kabupaten Kutai	▪ Konflik akan terjad antara warga

		Timur jika pembukaan lahan untuk tambang batubara dan kelapa sawit tidak terkendali.	melawan perusahaan dan pemerintah karena mereka terancam kehilangan lahan pertanian, hutan rotan dan tempat berkesenian.
		2) Ketidakseimbangan alam karena kegiatan pertambangan, perminyakan dan perkebunan.	■Konflik akan terjadi antara warga, pemerintah dan perusahaan karena pencemaran lingkungan, timbulnya penyakit, kelahiran cacat, dan lain-lain. termasuk kehancuran dan kepunahan rantai makanan
		3) Terdapat gejala potensi bencana alam yaitu Bencana Kebakaran Hutan yang mengancam setiap kemaru sawit di Bengalon, TNK, Koubun, Telen dan Muara Wahu.	Kebakaran hutan akan memicu konflik antara warga yang kekurangan pangan karena api membakar sumberdaya hutan sebagai sumber penghidupan seperti rotan, kayu bakar, buah-buahan dan sayuran
		4) Terdapat adanya gejala bencana alam yaitu Bencana angin topan terjadi di TNK.	Akan memicu konflik antara pemerintah dan warga karena banyak tanaman yang roboh namun pohonnya tak boleh dimanfaatkan.
		5) Terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu Potensi Bencana Kebakaran pemukiman di Sangatta Utara dan Selatan karena rumahnya berdempet seperti rumah renteng / berderet tanpa jarak terutama di pinggir jalan	Konflik saling menuding antara warga penyebab kebakaran atau asal aipi.
		6) Terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu Potensi bencana banjir yang sering terjadi di Sangatta Utara dan Selatan serta di daerah aliran sungai Sangatta karena pasang dan munculnya bangunan/gedung beringkat untuk bisnis dan pemerintah yang permanen	Konflik akan terpicu yaitu warga menuding pemerintah karena pemerintah tidak tegas dalam mengawasi bangunan.
		7) Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu Potensi Bencana Kebakaran perkebunan kelapa sawit di Bengalon, TNK, Koubun, Telen dan Muara Wahu.	Konflik akan terpicu antara pemilik perkebunan rakyat dan perkebunan milik perusahaan.
		8) Keseimbangan alam terganggu karena kegiatan tambang dan perkebunan kelapa sawit yang sangat rakus terhadap lahan baik terhadap hewan baik kijang, buaya, banteng, babi hutan, gajah dan lain-lain maupun tumbuhan seperti ulin, bengkirai, lempung, kapur, anggrek dan lain-lain	Potensi konflik terjadi i adanya serangan buaya terhadap penduduk, punahnya kijang, gajah, burung Enggang, kera dan lain-lain
		9) Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tsunami terutama di daerah pantai seperti di Batuputih	Akan terjadi konflik yaitu menyalahkan pemerintah bila terjadi tsunami yaitu karena upaya penyelamatan sangat minim terutama di pantai

		10) Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena dilewati truk bermuatan melebihi daya tahan tonase seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta.	Akan memicu konflik antara pemerintah . warga sekitar yang telah membangun dengan dana besar terhadap perusahaan yang meliwati jalan umum dengan tonase yang berlebihan.
		11) Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena mutu pemuatan jalan yang tidak sesuai spek seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta	Akan terjadi konflik antara sopir truk dan warga srtta pemerintah sekitar karena jalan longsor akan mengganggu llulintas
		12) Terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena tidak ada parit yang menampung air hujan seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta	Konflik saling menuduh anantara kontraktor dan pemerintah karena hasil audit BPKP bahwa perusahaan tidak seuai dengan speknya. Yaitu tidk diberi parit.
		13) Terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena jalan yang masih muda seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta	Akan terjadi konflik karena pemerintah disalahkan karena tidak tegas untuk mengambil tindakan hukum kepada pemuat beban truk yang meebih tonase
		14) Terdapat adanya gejala potensi bencana alam yaitu tanah longsor karena pondasi kurang kuat seperti di beberapa titik di jalan poros Bontang Sangatta.	Akan saling menuding antara pemegang proyek (KPA) dan PPPK karena kurang mengawasi dan tidak sesuai mekanisme proyek yang ditengrai adanya penyelewengan .

Sumber Data : Hasil Penelitian dei lapangan, 2014

C. Peta Daerah Rawan Bencana/Konflik Sosial

Berdasarkan Rumusan/ Ringkasan Hasil Penelitian Identifikasi Faktor Penyebab Bencana/ Konflik Sosial sebelumnya, berikut ini digambarkan peta (mapping) indentifikasi faktor penyebab daerah rawan bencana/ konflik sosial di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, dan Kabupaten Kutai Timur, seperti terlihat pada peta di bawah ini:

Gambar 3. Peta Daerah Rawan Bencana Sosial Kota Bontang



- ▲ = kebakaran (Lok Tuan, Bontang Kuala, depan BRI jalan separko, Berbas Pantai, Tanjung laut, Berbas Tengah, Tanjung laut indah, Bontang Baru dan kebakaran di Hutan Lindung TNK.
- = angin puting beliung (Kecamatan Bontang Selatan, Lok Tuan, Bontang Kuala)
- = banjir (Kelurahan **Salimpo**, **Kanaan**, Pisangan, Api-Api, Gunung Eki, Telihan dan Gunung Sahari)
- ▲ = tanah longsor (Kecamatan Bontang Barat **kelurahan Kanaan**. Bontang Utara.
- = politik (-)
- = sosbud(Loak Tuan: PT. LNG Badak, dan PT. Pupuk Kaltim. Bukit Tursina, Sekaming, Bontang Lestari (PT. Indominco dan PT. LNG Badak. Kel Guntung dan Kel **berbas Tengah**, Pasar Rawa Indah
- ▲ sara (Teluk Pandan, Kel Pisangan dan Jalan HM. Ardan ,Perumahan BTN dan Gang Karya kel Gunung Sahari
- = batas wilayah (Sidrap)
- ▲ = SDA

Gambar 4. Peta Daerah Rawan Bencana Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

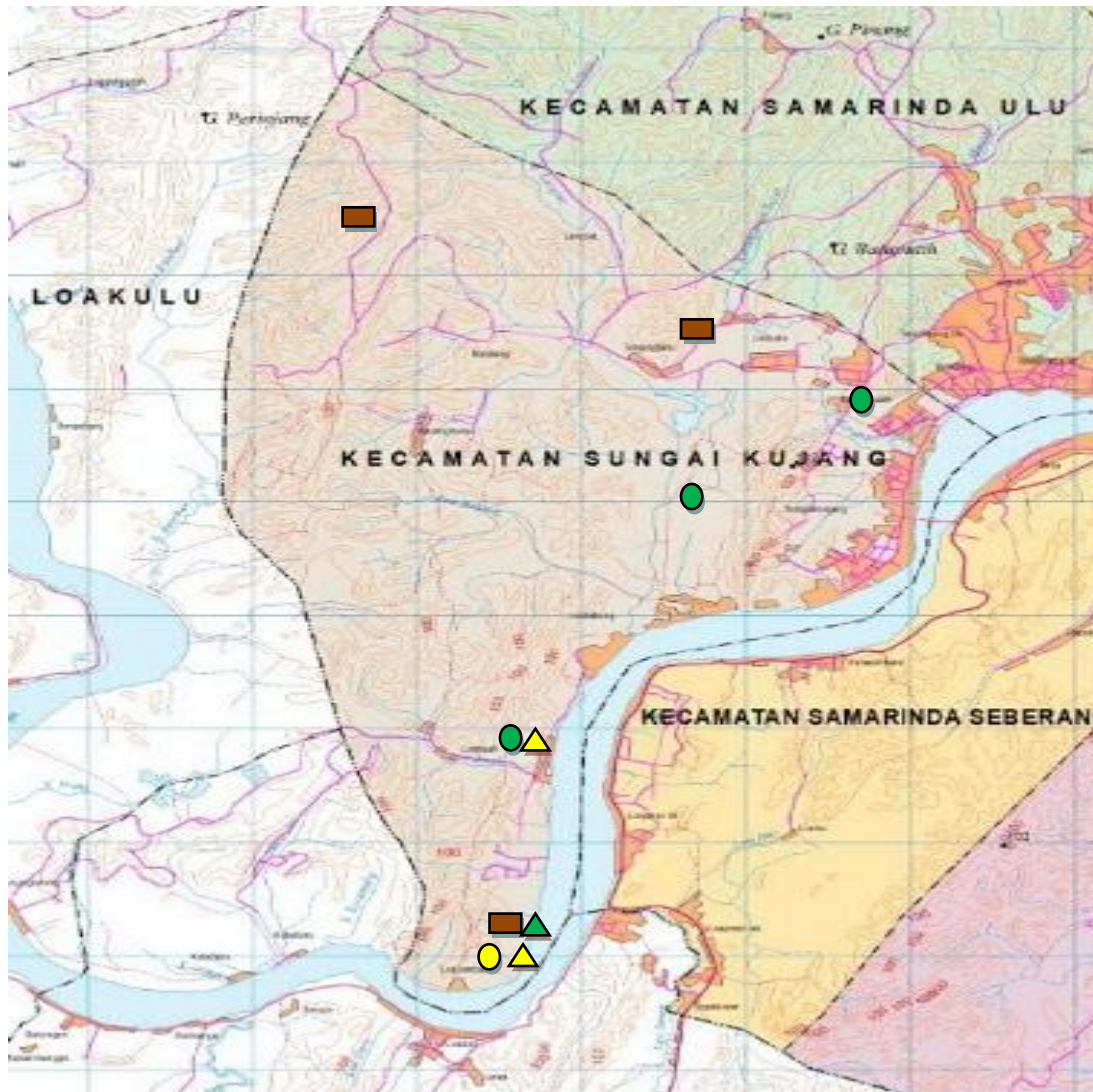


Gambar 5. Peta Daerah Rawan Bencana Sosial Kota Balikpapan Barat



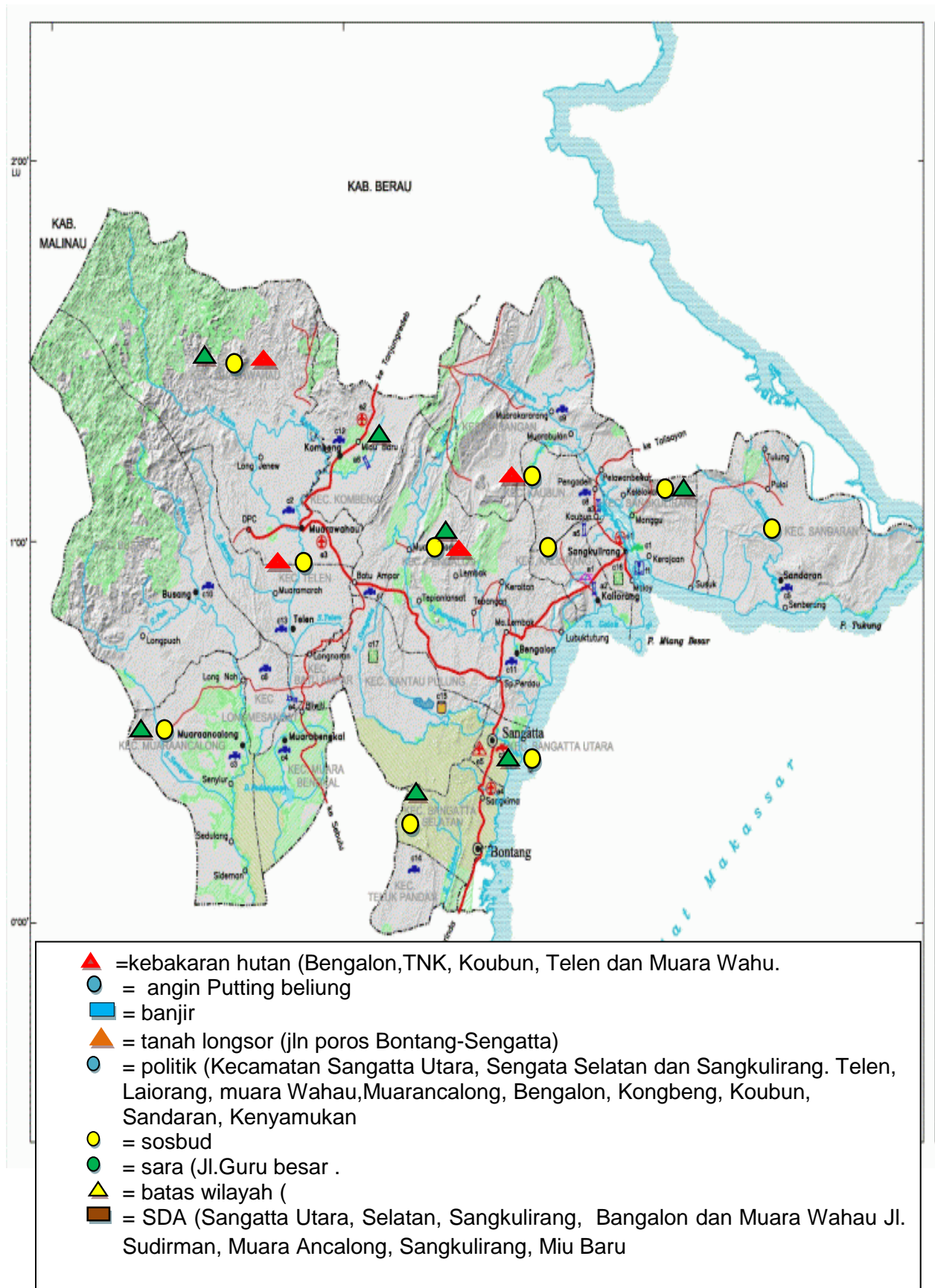
- ▲ = kebakaran (Kelurahan Margasari, Kampung baru dan Kampung Baru Ulu, Baru Tengah, Baru Ilir dan MargoMulyo.)
- = banjir (Baru Ilir dan Margasari.)
- ▲ = longsor (Kelurahan Baru Ulu, dan baru tengah, Gunung Rambutan Kelurahan Karang Rejo. Kelurahan Sumber Rejo, di Bukit Samirahan, Gunung Guntur. Di Kel Telaga Sari perbatasan Unocal kel Prapatan.)
- = angin puting (Kelurahan Baru Ulu, Baru Ilir dan Margasari)
- = politik -
- = sosbud (KIK di Kariangau berbatasan dengan Karang Joang, Kelurahan Baru Tengah, Baru Ulu, baru ilir)
- ▲ = sara (
- = batas wilayah (Kariangau)

Gambar 6. Peta Daerah Rawan Bencana Sosial Kecamatan Sungai Kunjang



- ▲ = kebakaran hutan (-)
- = banjir (Desa Karang Mulya dan Desa Bendang Kelurahan Lok Bahu)
- ▲ = longsor (-)
- = politik (Loa buah)
- = sosbud (Karang Anyar, Kel. Karang Asam Ilir dan Kel. Loa Buah,Loa Bakung)
- ▲ = sara (Loa Buah, Loa Bakung)
- = batas wilayah (Kel. Loa Buah, Kel. Beringin Raya, Kel. Lok Bahu)
- ▲ = SDA (Kel. Loa Buah)

Gambar 7. Peta Daerah Rawan Bencana Sosial Kabupaten Kutai Timur



BAB V SOLUSI DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian penyajian data, pembahasan dan ringkasan hasil penelitian berkaitan dengan ancaman potensi konflik sosial, serta memperhatikan dan merespon saran/masukan yang konstruktif dari peserta Focus Discussion Group (FGD) yang dilaksanakan selama 2 (dua) kali, khususnya identifikasi potensi daerah rawan bencana sosial di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kabupaten Kutai Timur, tahun 2014, berikut ini di gambarkan solusi dan rekomendasi pencegahan, penanganan dan penghentian bencana sosial tersebut sebagai berikut :

A. Alternatif Rekomendasi Pencegahan Bencana/Konflik Sosial

a. Sinergitas peran Pemerintah, TNI-POLRI, Swasta dan Unsur Tokoh Masyarakat :

- Pembentukan Tim Mediasi atau sejenis satgas berasal dari unsur Kepolisian, TNI, Tokoh berpengaruh, Pengusaha dan SKPD terkait yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan, sengketa pertambangan, perkebunan, baik permasalahan lahan, ketenagakerjaan maupun dampak negative lain dari industri perkebunan atau pertambangan.
- Mengoptimalkan peran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang diketuai oleh Bupati/ Walikota untuk mengadakan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi teknis guna menemukan substansi/akar setiap permasalahan serta mendeteksi sedini mungkin situasi dan kondisi daerah dan segala aktifitas sosial kemasyarakatan yang berkembang, khususnya mengidentifikasi orang/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang berpotensi sebagai pemicu atau pelaku kekerasan.
- Bekerjasama dengan provider komunikasi guna meredam isue SARA yang dihembuskan oleh provokator lokal maupun luar daerah.
- Mendorong adanya program CSR (*corporate social responsibility*) dari perusahaan pertambangan dan perkebunan, melaksanakan program kegiatan pencegahan konflik, program keserasional dan harmonisasi sosial, sebagai investasi sosial.

b. Advokasi Perdamaian Aspek Hukum :

- Advokasi biasanya dilakukan kepada Pemda, Kepolisian, DPRD dan lembaga negara lainnya. Advokasi memerlukan kepercayaan, otoritas, legitimasi, dan kemauan untuk mengintervensi kebijakan negara. Hal ini merupakan bagian dari upaya mengubah kebijakan agar negara atau Peraturan Daerah semakin peduli terhadap

eksistensi perdamaian, terutama bagaimana negara tidak membuat kebijakan yang menyulut konflik atau tidak melindungi korban konflik.

- Mengoptimalkan peran DPRD Provinsi/ DPRD Kab/Kota untuk menerbitkan PERDA HUKUM ADAT, mengingat salah satu faktor pemicu konflik sosial adalah pemberlakuan hukum adat etnik tertentu kepada etnis lainnya bertentangan dengan hukum NKRI.
- Review regulasi kewenangan Bupati (SKPD terkait perizinan tambang dan perkebunan) serta kewenangan camat atau kades dalam menerbitkan surat keterangan tanah berikut tata administrasi pencatatannya.
- Pengawasan intensif dan sanksi hukum yang tegas kepada mafia tanah dan mafia perizinan jika terbukti melanggar hukum yang berlaku.
- Pengawasan dan pembinaan wawasan kebangsaan kepada Ormas, OKP beratribut militerisme atau organisasi lainnya yang mengarah kepada radikalisme.

c. Menciptakan dan Optimalisasi Komunikasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal (Lokal Wisdom)

- Optimalisasi peran dan fungsi (pemberdayaan) Forum Perdamaian sampai ke desa atau kampung, seperti:
 - ✓ FKPMKT (Forum Komunikasi Antar Komponen Masyarakat)
 - ✓ FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) dalam rangka membangun sinergitas kerukunan antar umat beragama.
 - ✓ FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
 - ✓ FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)
 - ✓ Forum-Forum RT (Rukun Tetangga)
 - ✓ dan forum perdamaian lainnya, yang ada didaerah bersangkutan.
- Mengembangkan solusi penyelesaian/ sengketa dengan dialog (musyawarah) salah satu cara untuk saling memahami, mencari titik temu, dan menyelesaikan permasalahan. Dimensi dasar dari kualitas partisipasi adalah kontinuitas “DIALOG” atau NEGOSIASI sampai terjadinya kesepakatan atas penyelesaian kasus konflik tertentu.

d. Pemetaan Identifikasi Ancaman Potensi Konflik Sosial

- Pembuatan peta rawan bencana dan konflik sosial Kabupaten /Kota sampai pada tingkat Kecamatan, Kelurahan / Desa untuk dapat memonitor setiap saat perkembangan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
- Melakukan pemetaan (mapping) nilai-nilai kearifan lokal (lokal wisdom) masing-masing etnis/ suku untuk mediasi atau resolusi konflik sosial.

B. Rekomendasi Penghentian Bencana/Konflik Sosial

1. Melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pengrusakan/Korlap/penanggung jawab dalam konflik sosial.
2. Melokalisir kejadian agar tidak berkembang dengan cara mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat camat, kades, dan informal leader lainnya.
3. Mengamankan penganut aliran SARA yang menjadi sumber konflik dan sasaran kekerasan fisik dalam konflik sosial.
4. Melaksanakan penjagaan di lokasi kejadian dan patroli zona terpadu Polres, Polsek dan Polda di bantu oleh TNI.
5. Melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan (konflik SARA) dengan mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban;

DAFTAR PUSTAKA

1. Laporan Rapim POLRI. Identifikasi Potensi Konflik Yang Bersumber Dari SARA, Industri, Economy Gap, Masalah Ketenagakerjaan dan Dampak Industri Perkebunan Serta Penanggulangan Secara Efektif. Jakarta. 30 Januari 2013.
2. Laporan Paparan Kapolda Kalimantan Timur pada Rapat Konsolidasi Kominda Diperluas se Kalimantan Timur. 21 Februari 2013.
3. Ahmad Jubaidi. 2011. Peranan FKPMKT Dalam Proses Asimilasi & Rekonsiliasi Sosial Makalah disajikan: Dalam Rangka Kegiatan Penguatan Akses Kearifan Lokal Dinas Sosial Prov Kaltim Samarinda, 20 April 2011.
4. Ahmad Jubaidi. 2012. Resolusi Konflik Bencana Sosial di Kalimantan Timur. Makalah Disampaikan Untuk Kegiatan Rakor Kaltim Peduli Bencana 2012. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 11 September 2013.
5. Ahmad Jubaidi. 2013. Makalah. Perubahan Sosial dan Konflik Sosial. Makalah Disampaikan Untuk Kegiatan Pemantapan dan Penguatan Akses Kearifan Lokal Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Sabtu, 21 September 2013.

